



PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH
DALAM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI KOTA SEMARANG)

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

DIAN LATIFIANI
B4A003007

Dosen Pembimbing
PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005

PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH
DALAM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI KOTA SEMARANG)

TESIS

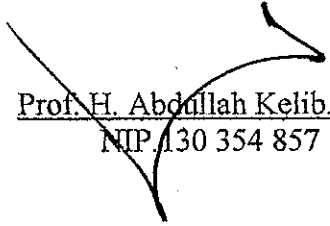
Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2005

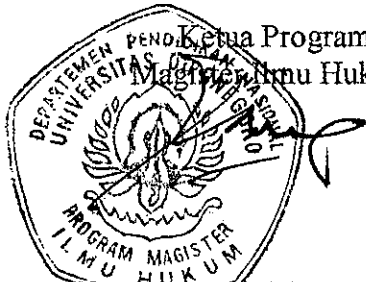
Disusun oleh

DIAN LATIFIANI
NIM : B4A003007

Mengetahui

Dosen Pembimbing


Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP.130 354 857


Prof. Dr. H. Baida Nawawi Arief, SH
NIP.130 350 519

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	4124/7/MIH/Kel
Tgl.	29-11-05

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"
(Q.S Mujaadilah: 11)

"Barang siapa terhalangi dari sifat lemah, lembut,
maka ia terhalang dari kebaikan seluruhnya"
(HR. Muslim)

"Jadikanlah setiap masalah menjadi sarana efektif
untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri"
(Abdullah Gymnastiar)

"Cinta yang sesungguhnya adalah memberi, bukan meminta"
(Penulis, Mei 2002)

Karya Kecil Ini Kupersembahkan Teruntuk:

- ⊕ Ibu dan Bapak yang tiada lelah mencurahkan segenap doa dan bantuannya kepada Penulis
- ⊕ Mas Rifqi dan Adik-adik tercinta (Emil & Fikri) yang selalu memberikan dorongan material dan spiritualnya demi kemajuan Penulis

ABSTRAKSI

Perkembangan Hukum Perbankan Syariah sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya bank syariah, karena merupakan landasan operasionalnya. Selain itu adanya fatwa haram MUI tentang bunga bank haram, secara nasional mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga pada perbankan syariah namun asset perbankan syariah hanya $\pm 1\%$ bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu dalam penelitian ini, berkaitan dengan posisi bank syariah dengan adanya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank dan perkembangan hukum perbankan syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pendekatan *socio legal*. Penelitian ini didukung dengan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder, sedangkan untuk pengecekan validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa posisi lembaga perbankan syariah secara yuridis formal dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 menjadi sama atau sederajat dengan bank konvensional. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI bahwa bunga bank haram, hal tersebut secara nasional menyebabkan penambahan dana pada perbankan syariah. Namun untuk Kota Semarang, tidak terjadi penambahan dana yang signifikan, karena masyarakat kota Semarang lebih pada pertimbangan untung rugi apabila berhubungan dengan bank syariah. Posisi bank syariah dengan adanya fatwa MUI dalam perbankan nasional tetap sebagai lembaga intermediasi, bank syariah mempunyai peranan pada pembangunan nasional.

Juga ditemukan faktor pendukung dalam operasional bank syariah antara lain landasan hukum UU No. 10 Tahun 1998 yang memakai *dual banking system*, keberagaman produk perbankan syariah, potensi pasar yang cukup besar karena mayoritas penduduk Indonesia muslim, masih banyak masyarakat muslim yang menginginkan system perbankan berdasar prinsip syariah. Sementara faktor penghambat operasional bank syariah antara lain kelengkapan aturan perbankan syariah yang masih sangat minim, kurangnya pemahaman masyarakat karena sosialisasi yang kurang, SDM yang masih langka, belum konsennya ulama terhadap perbankan syariah, kurang pengembangan/jaringan kantor bank syariah.

Perkembangan hukum perbankan syariah dimulai dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 yang dalam penyebutan istilahnya "bank berdasar bagi hasil". Kemudian tahun 1998 diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menyebut "bank berdasar prinsip syariah". Selanjutnya karena tuntutan masyarakat tahun 2002 dibuat naskah akademik RUU Perbankan Syariah, yang diharapkan akan terwujud UU Perbankan Syariah.

Prospek pasar bank syariah ke depan sangat bagus karena didukung dengan potensi 80 % penduduk Indonesia adalah muslim, keberagaman produk yang menarik apalagi didukung dengan strategi pengembangan "Cetak Biru Perbankan Syariah Bank Indonesia".

Kata kunci : Perkembangan, bank syariah, fatwa bunga bank haram

ABSTRACTION

The development of shariah banking law influences the growth and development of shariah bank, because that was the operational base. Besides of that, there was the MUI *fatwa* about a forbidden bank interest, nationally influences the development of third party fund at shariah banking, however the shariah banking asset is only $\pm 1\%$ if it compared with the conventional banking. Therefore, in this research, interrelated with the development of shariah banking law.

This research included qualitative research with socio legal approaching method. This research supported by two kinds of data which are primary and secondary data, while to the verification of data validity was using triangulasi technique.

Research result shows that the position of shariah banking institution formally juridical by prevailed the 1998 Act No. 10 and the 1999 Act No. 23 in the same manner as has changed with the 2004 Act No.3 becoming the same or equal with the conventional bank. By issued of the MUI *fatwa* that bank interest was forbidden, so nationally it causes fund increasing at the shariah banking. For Semarang, fund increasing didn't happened significantly, because Semarang's society more to the profit and lost consideration if it relates with shariah bank. The position of shariah bank to the MUI *fatwa* in the national banking was still as a intermediate institution, shariah bank has role to the national development.

The supporting factor in the operational of shariah bank were the law base the 1998 Act No. 10 that using dual banking system, shariah banking variety product, market potentation that big enough because Indonesian society majority was Moslem, there still much enough Moslem society who wants banking system based on shariah principle. The operational inhibiting factor of shariah bank were a completeness of shariah banking regulation that still very minimum, people understanding that still less because of the less sosialitation, the rare of human resource, the ulama's unconsents to the shariah banking, the less of shariah bank office network developing.

The development of shariah banking act started by established 1992 Act No. 7 that calls in its term "bank based on profit share". Afterward, at the year of 1998 was established 1998 Act No. 10 that explicitly calls "bank based on shariah principle". Furthermore, because of people demands, at the year of 2002 was made an academic manuscript of Shariah Banking Bill, that expected would be realized The Shariah Banking Act.

Shariah Bank Market Prospect in the future was very good because it was supported by 80% potentation Indonesian society was Moslem, an interesting variety product more over was supported with development strategy "Indonesia Bank Shariah Banking Blue Print".

Key Words : development, shariah banking, forbidden bank interest *fatwa*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat Rahmat serta Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam (Studi Di Kota Semarang)”** ini dengan baik dan lancar.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini;
4. Ibu Prof. Dr. Esmi Warassih P, SH, MS dan Bapak H. A. Tulus Sartono, S.H, M.S selaku Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga menjadi bermakna;

5. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang dengan perantaraanya penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat;
6. Sekretaris Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Ani Purwanti, SH, MFI, yang bersedia membantu dan mendengarkan curhat dan keluh kesah penulis serta seluruh staf Sekretariat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuan dan kemudahan selama pelaksanaan studi;
7. Ibu Ro'fah Setyowati, S.H, MHum selaku dosen dan juga "ibu", terima kasih atas semua taushuhnya;
8. Pimpinan KBI Semarang, Bu Karlina, Mak Kris, atas bantuannya
9. Pimpinan Cabang Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang cq. Sekretaris Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang yang telah membantu Penulis selama melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang;
10. Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang cq. Manager Operasi, Bapak Ucok Mulyadi yang telah membantu Penulis;
11. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang cq. Kabag Umum, Bapak Rahadi yang telah membantu Penulis;
12. Ibu dan Bapak tercinta, maafkan karena belum memberikan dan membalas jasa dengan sesuatu yang berarti; Mas dan Adik-adik tersayang, Eyang Putri dan Eyang Kakung, Bulik-bulik, Om-om dan semua adik-adik sepupu atas doa dan dorongannya selama ini kepada Penulis;

13. Teman-teman'98, Dewi, Rahma, "Jeng" Sita, Mungki, Sugeng, Desi A, mpok Nori, Sarah *thanks for being my bestfriend*;
14. Sohib-sohib MIH 2003, khususnya kelas HET, mba Kloir, mas Edi, Edi Aul, Endah, Novita, Pak Leman, Robert, Bu Istikah, mas Jo, terima kasih
15. My best friends Anis, Helda, Mel, thanks for everything, cepetan nyusul....
16. Bapak-bapak dan Ibu serta Mbak petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Undip, khususnya buat Mbak Fahimah, S.Sos (*setiap peristiwa pasti ada hikmahnya kan*) dan makasih buat pinjaman buku dan skripsinya;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada Penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan masukan dan kritiknya dari para pembaca sekalian. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis pribadi dan umumnya kepada seluruh pembaca sekalian. Amien.

Semarang, Maret 2005

Penulis

DAFTAR RALAT

Hal	Tertulis	Seharusnya
x,7,8,91,97,98,101	Fatwa haram MUI	Fatwa MUI tentang bunga bank haram
x,72,86,88	Fatwa haram	Fatwa MUI tentang bunga bank haram
x,85	Fatwa MUI tentang bunga bank haram MUI	Fatwa MUI tentang bunga bank haram
8	khususnya	khususnya
12	dientukan	ditentukan
16	akor	aktor
68	memeperoleh	memperoleh
71	dati	dari
87	esama	sesama
97,162	asset	aset
102	mengganggu	menanggung
105	negativr	negative
106,180	disbanding	dibanding
108	mudharabah	<i>mudharabah</i>
109	operasion	operasional
	operasioanl	operasional
118	digunakannya	digunakannya
	ditekankan	ditekankan
122	32/34KEP/DIR	32/34/KEP/DIR
126	keungan	keuangan
130	lazin	lazim
146	berkewrganegaraan	berkewarganegaraan
148,161,176	instrument	instrumen
153	negative	<i>negative</i>
	system	sistem
155	operasioanal	operasional
158	profit oriented	<i>profit oriented</i>
163	skill	<i>skill</i>
	professional	<i>professional</i>
164	profesi	<i>profesi</i>
167	jumlah	jumlah
169	<i>reasearch</i>	<i>research</i>
172	Brunie	Brunei
175	naming	namun
176	peneribitan	Penerbitan
	sembalian	Sembilan
	BGA	BCA

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACTION	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR RALAT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. KONTRIBUSI PENELITIAN.....	8
E. KERANGKA TEORI	9
F. METODE PENELITIAN.....	19
G. SISTIMATIKA PENULISAN	28
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN NASIONAL	30
1. Industri Perbankan	30
2. Perbankan Di Indonesia	33
2.1 Pengertian Bank	33
2.2 Jenis-Jenis Bank di Indonesia	35
2.3 Fungsi Perbankan	38
3. Restrukturisasi Perbankan	39
B. KEHADIRAN BANK SYARIAH DI INDONESIA	41

1. BERLAKUNYA SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM	41
1.1 Islam Sebagai Way of Life	41
1.2 Prinsip Syariah Tentang Harta Dan Ekonomi	43
1.2.1.1 Kepemilikan Atas Harta Merupakan Amanah	43
1.2.1.2 Harta Merupakan Kebutuhan Sekaligus Ujian	45
1.2.1.3 Usaha Yang Halal Dan Baik	46
2. BEBERAPA PANDANGAN DALAM ISLAM TERHADAP RIBA DAN BUNGA BANK	48
3. KEBUTUHAN TERHADAP PEMBENTUKAN BANK SYARIAH	52
C. SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH.....	55
1. KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN BANK SYARIAH	55
2. JENIS JASA	68
2.1. PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA	68
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. POSISI BANK SYARIAH DENGAN ADANYA FATWA HARAM MUI	72
1. Latar Sosial Setting Wilayah Penelitian Kota Semarang	72
2. Posisi Bank Syariah Dengan Adanya Fatwa Haram	85
1.1 Alasan Dikeluarkannya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Haram MUI	85
1.2 Tanggapan Masyarakat	88
1.3 Posisi Bank Syariah Dengan Adanya Fatwa Haram MUI.....	97
3. Faktor Pendukung Dalam Oprasional Bank Syariah	101
4. Faktor Penghambat Dalam Operasional Bank Syariah ..	106
B. PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM, PROSPEK & STRATEGI PENGEMBANGAN.	113
1. Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Islam (Hukum Ekonomi Islam)	113
1.1 Periode Tahun 1992-1998.....	116

1.2 Periode Tahun 1998-sekarang	120
2. Prospek Pasar Bank Syariah	152
3. Strategi Pengembangan Bank Syariah	154
3.1 Misi, Visi, Sasaran Pengembangan Bank Syariah	154
3.2 Latar Belakang Kebijakan Pengembangan Bank Syariah Nasional	155
3.3 Potensi Pengembangan Bank Syariah	156
3.4 Sasaran Pengembangan Bank Syariah	160
3.5 Pentahapan Pencapaian Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah	162
3.6 Permasalahan Dan Tantangan Utama	164
3.7 Perkembangan Kelembagaan, Sumber Daya Insani, Pendidikan Dan Operasional Perbankan Syariah	166
BAB IV. PENUTUP	178
A. KESIMPULAN	178
B. SARAN	180
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

		hal
Tabel 1	Luas Wilayah dan Prosentasenya Terhadap Luas Kota Semarang (ha)	75
Tabel 2	Variasi Mata Pencaharian Masyarakat Kota Semarang	78
Tabel 3	Data Pemeluk Agama Masyarakat Kota Semarang	78
Tabel 4	Banyaknya Tempat Ibadah Kota Semarang	79
Tabel 5	Data Perguruan Agama Islam Kota Semarang	81
Tabel 6	Data Lembaga Pendidikan Agama Perkecamatan Kota Semarang	82
Tabel 7	Banyaknya Jamaah Haji Tiap Kecamatan Kota Semarang	84
Tabel 8	Indikator Bank Muamalat Cabang Semarang (Dalam Miliar Rp)	99
Tabel 9	Jaringan Kantor Perbankan Syariah	168
Bagan 1	Islam A Comprehensive Way Of Life	114
Bagan 2	Asas-Asas Hukum Ditinjau Dari Kajian Hukum Ekonomi	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan ekonomi peranan lembaga keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya tidak diragukan lagi. Pentingnya lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman berbagai usaha. Lembaga keuangan dalam suatu perekonomian ibarat sebagai jantung dalam tubuh manusia, jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan terjaga. Namun jika jantung mengalami gangguan maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Efisiensi usaha lembaga perbankan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha.

Perekonomian Indonesia mengalami tekanan sangat berat terutama di sektor moneter yang berlangsung tahun 1997. Dalam waktu singkat, dari bulan Juli 1997 sampai 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, disamping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah.

Biaya restrukturisasi dan penyehatan perbankan Indonesia sangat mahal (diperkirakan mencapai Rp. 400 triliun), dan ada kemungkinan sebagian besar biaya penyelamatan perbankan tersebut akan ditanggung rakyat melalui APBN.¹

Dalam keadaan perbankan harus hidup dari bunga deposito yang sangat tinggi, maka hanya bank-bank yang tidak melakukan kegiatan berdasarkan sistem bunga tapi memakai prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing principle*, yang tidak terkena *negative spread* seperti di atas. Hancurnya perekonomian Indonesia tidak hanya pada perbankan saja tapi juga menyebabkan hancurnya berbagai macam lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Banyaknya bank swasta yang menganut sistem konvensional menderita kerugian besar dikarenakan hancurnya mata uang rupiah yang membuat masyarakat melakukan penarikan dana secara besar-besaran dan menyebabkan bank tersebut *collaps*. Selain itu lesunya kegiatan perekonomian juga membuat industri asuransi dan pasar modal terkena imbas negatif dari krisis moneter dan politik. Jatuhnya indeks harga saham gabungan hingga mencapai level 200-an pada September 1998 menunjukkan bahwa saat itu ekonomi Indonesia berada di titik nadir.²

Sementara itu lembaga keuangan syariah, secara operasional, memang dapat dikatakan bahwa mereka terkena imbas dari krisis yang terjadi. Akan

¹ Zainul Arifin dalam Kata Pengantar buku *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta : Alvabet, 2000), hal vii

² Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 3-2003/1424 II, hal 2

tetapi, kemampuan mereka untuk bertahan membuat para pejabat di bidang Ekuin mulai memperhatikan perekonomian dengan basis syariah sebagai alternatif dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Di sisi lain masih ada umat Islam yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari dilaksanakannya sistem bunga yang diyakini sebagai riba yang diharamkan. Larangan terhadap riba tersebut antara lain terdapat pada QS Al-Baqoroh Ayat 275, 276 dan 278.³

Oleh karenanya diperlukan konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan sistem *profit and loss sharing* yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun menghadapi risiko.

Kehadiran bank syariah sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat Islam. Hal itu antara lain terungkap dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menctapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang *Bunga Bank dan*

³ Baca Surah Al-Baqoroh Ayat 275, 276 dan 278, *Al Quran dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 1995)

Perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian diikuti dengan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, maka Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.⁴

Kehadiran bank syariah atau bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan yang dialami masyarakat saat ini, konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim).

Di samping itu bank syariah mengutamakan stabilitas ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas bank Islam diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi kemandirian

⁴ Zainul Arifin, Makalah *Operasional Bank Syariah Di Indonesia*, disampaikan pada Lokakarya Perbankan Syariah Bagi Ulama tanggal 26 April 1999 di gedung BI Jakarta.

lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri⁵.

Akibat nyata dari diterapkannya sistem bunga, konsentrasi kekayaan berada pada para bankir, kelompok elite pemilik modal⁶. Alokasi yang tak rata ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin makin besar dan rawan untuk terjadinya konflik di masyarakat.

Adanya krisis moneter dan bukti bahwa bank syariah mampu bertahan, timbullah kesadaran pemerintah untuk merevisi Undang-undang No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dan tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004. Kedua Undang-undang ini merupakan landasan yuridis yang sangat kuat bagi berlakunya bank atas dasar syariah di Indonesia. Karena Undang-undang tersebut secara jelas telah mengakomodir kata "Syariah" yang sebelumnya hanya bank dengan prinsip Bagi Hasil.

Akhir tahun 2003 yang lalu, masyarakat perbankan di Indonesia dikejutkan dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bunga bank haram. Bankir dari bank konvensional, tampak gerah dengan fatwa

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 18

⁶ Ibid, hal 13

MUI tersebut. Mereka khawatir, fatwa MUI tersebut akan berdampak pada bergesernya komposisi dana dari bank konvensional ke bank syariah. Sementara itu sikap Bank Indonesia (BI) dikemukakan oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, menghormati fatwa MUI yang menegaskan mengenai bunga bank haram.

Sementara itu sejumlah bank syariah merespon dengan positif, seperti bank Muamalat yang menargetkan membuka 50 gerai syariah di tahun 2004 begitu pula BRI yang setahun lalu telah membuka unit syariah, namun baru awal tahun ini melakukan ekspansi diresmikan kantor cabangnya. Sementara bank-bank konvensional turut memperluas pasar syariah dengan membuka unit-unit syariah. Diantaranya bank Niaga dan bank Tugu. Geliat perkembangan bank syariah juga terjadi di daerah-daerah. Bank milik pemerintah kota juga tertarik untuk membuka unit syariah. Antara lain hadirnya unit syariah BPD DKI Jakarta, BPD Sumut, BPD Jambi, BPD Riau⁷. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang perkembangan hukum perbankan syariah dengan adanya fatwa haram dari MUI.

B. PERUMUSAN MASALAH

Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan akhir tahun 2003 membuat kekhawatiran dari kalangan praktisi perbankan konvensional atas

⁷ Majalah Modal No.16/II-FEBRUARI 2004.

perpindahan komposisi dana dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Total asset bank syariah pada tahun 2000 baru sekitar Rp.1,3 triliun menjadi hampir Rp. 8,8 triliun pada Januari 2004. Dana pihak ketiga yang dihimpun naik dari sekitar Rp. 0,7 triliun pada 2000 menjadi Rp. 6,6 triliun pada Januari 2004. Pembiayaanpun meningkat dari sekitar Rp. 1,2 triliun pada 2000 menjadi Rp. 5,86 triliun pada Januari 2004. Namun di sisi lain berdasarkan penelitian KARIM Business Consulting & PROMPT tahun 2003⁸ minim sekali pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah, padahal sejak tahun 1992 bank syariah telah ada di Indonesia. Sehingga hanya komunitas masyarakat tertentu saja (masyarakat muslim yang mempunyai ghirah (semangat) religiusitas tinggi) yang tersentuh oleh bank syariah. Padahal jumlah penduduk Indonesia 80% beragama Islam. Cepat atau lambat perkembangan bank syariah dipengaruhi oleh faktor regulasi yang ada dan pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Hal inilah yang mendasari penulis untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi bank syariah dengan adanya fatwa haram MUI, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam operasionalnya?
2. Bagaimana perkembangan hukum perbankan syariah dalam ekonomi Islam, prospek dan strategi pengembangannya ?

⁸ ibid

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengenai hal-hal :

1. Untuk memahami dan menjelaskan posisi bank syariah dengan adanya fatwa haram MUI, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam operasionalnya khususnya di kota Semarang.
2. Untuk memahami dan menganalisis perkembangan hukum perbankan syariah dalam ekonomi Islam, prospek dan strategi pengembangan bank syariah.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Teoritik

Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep pemikiran, metode atau teori dalam khasanah studi ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi Islam pada khususnya, terutama yang menyangkut hukum perbankan syariah yang mulai dikembangkan Indonesia dewasa ini.

2. Praktis

Memberikan masukan kepada praktisi perbankan syariah dalam pengembangan bank syariah khususnya di Kota Semarang.

E. KERANGKA TEORITIK

E.1 Latar Teoritis Masalah

Dalam teoritis masalah ini, diuraikan tentang 3 (tiga) hal, yaitu teori syariah tentang riba dan bunga bank, prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah dan teori manajemen bank yang sesuai dengan ketentuan bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter.

E.1.1 Teori Syariah Tentang Riba Dan Bunga Bank

Allah SWT telah melarang riba sebagaimana firmanNya dalam Al-Quran Surat AlBaqoroh ayat 275-277, selain itu juga dalam QS Ali Imron (3):130, yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, supaya kamu mendapat keberuntungan".

Menurut **Ibnu Taimiyah**, para ulama sepakat menyatakan bahwa riba nasi'ah yaitu pinjam meminjam dengan persyaratan bunga berdasarkan tenggang waktu pembayarannya, adalah haram hukumnya.⁹

Dan situasi turunnya ayat-ayat di atas yaitu dalam masyarakat jahiliyah, riba nasi'ah ini dalam prakteknya adalah riba antara orang yang sangat membutuhkan untuk mempertahankan hidupnya, yakni orang-orang yang sedang terdesak, dicekam maut, perut keroncongan, tidak mempunyai

⁹ Muhammad ibn Taimiyyah, *Al-muntaqo*, (Beirut : Salafiyah, , tt), hal. 781

apa-apa, dengan orang-orang yang mampu yang berambisi sekali untuk memeras saudaranya dalam kesempitan. Orang yang mampu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan untuk waktu tertentu dengan syarat adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan tambahan inilah yang menurut mereka riba.¹⁰ Dalam hal ini turunnya ayat atau hadist dalam situasi tertentu, tidaklah menunjukkan bahwa hukum yang dinyatakan oleh ayat atau hadist yang umum itu, hanya untuk situasi atau kondisi itu saja. Kaidah usul Fiqh menyebutkan : *"Al ibratu bi 'umumil lafdzi laa bikhusuusi sabab"*. Artinya : *"yang menjadikan patokan adalah umumnya pengertian lafadz, bukanlah sebab yang khusus."*¹¹

Ada pandangan yang menganggap bahwa larangan pengenaan riba itu bersifat relatif dan kasuistik tidak termasuk bunga bank konvensional seperti sekarang ini. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa riba dilarang karena menyengsarakan sehingga larangan riba itu hanya untuk pinjaman konsumtif dan tidak dalam keadaan darurat. Kemudian ada lagi yang membolehkan pinjaman berbunga, seperti bunga bank dewasa ini, beralasan karena bunga bank itu tidaklah berlipat ganda, sedangkan yang dilarang ayat 130 surat Ali Imron adalah riba yang berlipat ganda.

Menurut para ahli tafsir ayat larangan riba tersebut adalah untuk

¹⁰ Abu al-A'la alMaududi, *ar-Riba, dar al Fikr*, t.t.p, t.t, hal 81

¹¹ Fuad Mohd. Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung : PT Al Ma'arif, 1983), hal 44-45

menjauhkan para rentenir dari keinginan makan harta riba dan menginginkan bahwa bunga uang itu akan menjadi berlipat ganda dari uang yang dipinjamkan, jikalau telah berlangsung dalam tempo yang cukup lama walaupun pada mulanya bunga itu kecil saja.¹²

Bagi yang berpendapat bahwa ayat larangan riba itu hanya berlaku pada pinjaman konsumtif, seperti praktek masyarakat jahiliyah, maka pada pinjaman produktif untuk melancarkan usaha dan dengan itu akan diperoleh keuntungan, patut dan adil jika kreditur (bank) berhak mendapat sebagian keuntungannya. Pendapat ini akan dihadapkan pada kasus apabila peminjam (debitur) mengalami kerugian. Dalam hal ini, bank tidak ikut menanggung kerugian tersebut, sedang peminjam tetap harus membayar pinjaman berikut bunganya.¹³

Menurut Al-Jurjani, sistem riba adalah bencana bagi dunia. Sebab apabila manusia terus menerus melanjutkan sistem ini di dalam menggunakan uang, mereka akan cenderung santai-santai, malas dan tidak mau bekerja. Padahal apabila semua mau bekerja, maka mereka cenderung kepada terciptanya guna dan manfaat untuk kesejahteraan bersama, kalau pekerjaan mereka menyimpang dari guna dan manfaat maka ucapkan selamat tinggal atas dunia dan penghuninya.¹⁴

¹² Al-Thubary, *Jami'ul Bayan*, Jilid 5, (Beirut : Maktab Islam, 1972), hal 19

¹³ Fuad Mohd. Fachruddin, op.cit, hal. 30

¹⁴ Syaikh Ali Ahmad Al Jurjani, *Hikmah Al Tasri 'Wa Falsafatuhu*, (Cairo : Maktabah Jami'iyah Al Azhar, t.t.), hal 170-172

E.1.2 Prinsip Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investments*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investments*) melalui mekanisme jual beli (*ba'i*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).¹⁵

Menurut Karnaen Perwaatmaja dan Syafi'i Antonio, investasi atas dasar bagi hasil al-mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang ada diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan usaha. Hasil bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditanda tangani.¹⁶

E.1.3 Teori Tentang Manajemen Bank

Kesehatan bank sebenarnya ditentukan oleh sejauh mana manajemen bank mampu mengelola dan mengendalikan risiko bank. Risiko bank adalah potensi fluktuasi yang merugikan laba bank atau *cash flow* atau modal bank sebagai dampak yang diakibatkan oleh nasabah, internal control yang kurang

¹⁵ Zainul Arifin, *op.cit*, hal 30

¹⁶ Karnaen Perwaatmaja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal 21

memadai, kegagalan sistem pengawasan dan mismanajemen. Risiko yang dihadapi bank secara umum dapat digolongkan sebagai berikut :¹⁷

- a. Risiko kredit (*credit risk*), risiko ini timbul akibat kegagalan debitur/obligor untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang diperjanjikan dengan bank.
- b. Risiko bunga (*interest rate risk*), risiko ini ditimbulkan oleh perubahan suku bunga yang terjadi di Pasar.
- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko ini timbul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.
- d. Risiko harga (*price risk*), risiko ini timbul akibat dari kegiatan perdagangan, dealing dan position taking dalam suku bunga, valuta asing, saham dan pasar-pasar komoditi.
- e. Risiko konversi Valas (*foreign currency translation risk*), risiko ini timbul akibat konversi laporan bank dari satu valuta ke valuta lainnya.
- f. Risiko transaksi (*transaction risk*), risiko ini timbul akibat kejahatan, kesalahan, dan ketidakmampuan menyerahkan produk atau jasa, mempertahankan posisi persaingan dan mengelola informasi.
- g. Risiko kepatuhan (*compliance risk*), risiko ini timbul akibat pelanggaran atau penyimpangan dari undang-undang dan peraturan-peraturan ataupun praktek-praktek yang diwajibkan serta standar etika.
- h. Risiko strategis (*strategic risk*), risiko ini timbul akibat keputusan bisnis yang bertentangan, implementasi keputusan yang tidak tepat atau kurangnya respon terhadap perubahan industri.
- i. Risiko reputasi (*reputation risk*), risiko ini timbul akibat opini public yang negative.

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabahnya. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan

¹⁷ BI Surabaya, "Tugas BI dalam Pembinaan dan Pengawasan Perbankan", makalah, dalam Pelatihan Khusus Hakim Tingkat Pertama, Malang 2002, hal 13-16

bank adalah dengan analisis CAMEL yang unsur-unsur penilaiannya adalah sebagai berikut:

- a. *Capital*, penilaian didasarkan pada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*capital adequacy ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
- b. *Assets*, penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank rasio yang diukur ada dua macam, yaitu :
 1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.
 2. Rasio penyisihan, penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.
- c. Manajemen, penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum.
- d. *Earning*, penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.
- e. *Liquidity*, yaitu untuk menilai likuiditas bank yang didasarkan pada dua macam rasio, yaitu :
 1. Rasio jumlah kewajiban bersih Call money terhadap aktiva lancar dan yang termasuk aktiva lancar adalah Kas, Giro pada BI, sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank lain.
 2. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.¹⁹

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal 185-186

E.2 Landasan Analisis

Penelitian ini melihat prospek dan pengembangan bank syariah dari institusi bank syariah itu sendiri dan juga melihat seberapa besar potensi dan preferensi masyarakat Semarang terhadap bank syariah. Agar penelitian ini tersruktur dan terarah, menggunakan suatu paradigma. Paradigma didefinisikan bermacam-macam sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang. Ada yang menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan dari suatu ilmu. Namun secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat kepercayaan dan keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak di kehidupan sehari-hari²⁰.

Istilah paradigma berasal dari bahasa latin, yaitu *paradeigma* yang berarti pola. Istilah ini oleh **Khun** dipergunakan untuk menunjukkan dua pengertian utama, yaitu diartikan sebagai totalitas konstilasi pemikiran, keyakinan, nilai persepsi dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua diartikan sebagai upaya memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkir balikkan semua asumsi maupun aturan yang ada²¹.

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, yang memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri tidak

²⁰ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), hal 33

²¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 33

memandang manusia sebagai individu yang statis dan terpaksa dalam bertindak, sebagaimana paradigma perilaku sosial yang memandang manusia kurang memiliki kebebasan bertindak. Fokus perhatian paradigma ini adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Dengan demikian, tujuan paradigma ini adalah untuk memahami perilaku sosial melalui penafsirannya dan dengan itu menerangkan jalan perkembangan dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya²².

Sementara pendekatan teori analisis yang digunakan berdasar pada teori aksi (*action theory*) yang dicetuskan oleh **Max Weber** (sebagai salah satu teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial selain teori interaksionisme simbolik (*simbolik interaksionism*) dan fenomenologi (*phenomenology*)²³).

Teori aksi sebagaimana kedua teori lainnya yang termasuk dalam paradigma definisi sosial, mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu:

1. Manusia adalah merupakan aktor aktif dan kreatif dari realitas sosial;
2. Realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan sebagainya yang kesemuanya tercakup pada konsep fakta sosial;
3. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak diluar batas kontrol dari fakta sosial²⁴.

Sebagai pencetus teori aksi, **Max Weber** menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Konsep

²² George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Terjemahan oleh Alimandan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal 104-105. Pendapat serupa dapat dilihat KJ. Veger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1993)

²³ *ibid*, hal 49

²⁴ *opcit*, hal 51

tersebut menekankan bahwa realitas sosial tidaklah berwujud secara obyektif. Kehidupan sosial, secara rumit dibentuk oleh *cultur* dan makna, karena para pelaku menggunakan pengetahuan mereka, untuk menyesuaikan diri dan mengubah dunia, dimana mereka menjadi bagiannya²⁵. Walaupun manusia tidak mempunyai kebebasan total, karena adanya pembatasan dari berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma, serta situasi penting lainnya, tetapi aktor mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternative tindakan.

Kemampuan inilah yang oleh Parson disebut sebagai *voluntarism* (kesukarelaan), yaitu kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternative yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

Menurut Weber untuk dapat memahami tindakan manusia harus memahami dulu apa yang disebut tindakan sosial, yaitu tindakan individu, sepanjang tindakan itu mempunyai makna subyektif bagi dirinya, dan diarahkan pada tindakan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan metode *verstehen*, atau melalui penafsiran dan pemahaman, dengan tujuan agar dapat memahami motif dari tindakan masing-masing aktor²⁶.

Weber percaya bahwa sangat kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat, dapat dimengerti hanya dengan mencapai suatu

²⁵ Robert W Hefner, Geger Tengger: *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, (Yogyakarta: LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, 1999), hal xiv

²⁶ George Ritzer, op.cit, hal 44 dan 46

pemahaman mengenai segi-segi subyektif dari kegiatan anatar pribadi, dari para anggota masyarakat itu²⁷.

Berdasarkan pendapat **Max Weber** dan **Parson**, diketahui bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses, dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilihnya, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinan oleh sistem budaya, dalam bentuk norma-norma, ide-ide, nilai-nilai sosial. Di dalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemampuan bebas.

Penelitian ini juga melihat dari institusinya dalam hal ini bank syariahnya. Untuk analisis mengenai diundangkannya Undang-undang yang mengaturnya digunakan teori dari **Nonet-Shelznick** tentang hukum responsif. Dalam teorinya tentang konsepsi tipe hukum responsif (selain konsepsi tipe hukum represif dan otonom), yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat²⁸. Lebih lanjut **Nonet-Shelznick** mengatakan:

A third type of law strives to resolve that tension. We call it responsive, rather than open or adaptive, to suggest a capacity for responsible, and hence discriminate and selective, adaptation. A

²⁷ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian Perbandingan*, Terjemahan F. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal 199

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Semarang: Penerbit Agung Press, 1989), hal 42

*responsive institution retains a grasp on what is essential to its integrity while taking account of new forces in its environment*²⁹.

Dijelaskan bahwa dalam berbagai lapangan hidup, timbul keinginan-keinginan untuk mencapai hukum responsif, yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam konsepsi hukum responsif ditekankan pentingnya makna dari sasaran kebijakan, dan penjabaran juridis dari reaksi kebijakan, serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”³⁰.

²⁹ Philippe Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, (New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper Colophon Books Harper & Row, Publishers 1978), hal 77

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001), hal 28

Research menurut **Sutrisno Hadi** dapat didefinisikan sebagai usaha menemukan, menghubungkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dimana usaha dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³¹

Sedangkan menurut **Moehar Daniel**, penelitian atau penyelidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap.³²

Abdullah Kelib menyatakan, metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.³³

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi yang digunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal atau normative dan pendekatan non doctrinal atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan, penelitian ini tidak melihat hukum hanya sebagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM Yogya, 1969), hal 4

³² Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaannya*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2003), hal 5

³³ Abdullah Kelib, "Metodologi Penelitian Fiqh dan Hukum Sekuler" dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum FH Undip* No.5/1995, hal 5 dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hal 12)

tapi juga melihat proses berlakunya hukum oleh lembaga-lembaga yang terkait.

Pendekatan yang dipakai adalah *yuridis sosiologis*, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normative atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (*law in the books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Atau dengan kata lain untuk mengetahui mengapa terjadi *gap* (kesenjangan) antara kenyataan (*das Sein*) dengan yang seharusnya (*das Sollen*) dan bagaimana cara mengatasi suatu kesulitan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan "*social legal research*" yaitu gabungan antara penelitian normative dan sosiologis yang juga disebut dengan penelitian *yuridis empiris*,³⁴ (penelitian terpadu dengan paradigma ganda).

Berdasarkan hal dimaksud tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*³⁵, yang diharapkan ditemukan makna-makna tersembunyi di balik permasalahan sebagai objek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistik*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

³⁴ Bustanuddin Agus, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah Dan Ajaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal 71 bandingkan dengan George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, (Terjemahan oleh Alimandan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal 175

³⁵ Hajah Esmi Warassih Pujirahayu, "Metodologi Penelitian Bidang Humaniora", Makalah dalam Pelatihan Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku³⁶. Sedangkan **Hadari Nawawi** menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya³⁷.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor bank syariah yang ada di Semarang, Kantor Bank Indonesia Semarang, tokoh MUI Jateng, BPS Semarang. Dipilihnya kota Semarang, karena sebagai Ibukota Jawa Tengah mempunyai kedinamisan baik dari masyarakatnya dan juga perekonomiannya.

3. Spesifikasi penelitian

Tipe kajian dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena mempresentasikan usaha peneliti untuk secara objektif memuat rekaman yang rinci dan komprehensif tentang apa saja (situasi, orang, aktivitas, percakapan

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Karya, 1998), hal 20-21

³⁷ H. Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal 175

dan lain-lain) yang ditemukan di lapangan.³⁸ Dalam penelitian ini bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan statistik, dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu akan *mengeksplanasi* tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan Bank Syariah, terutama dari aspek hukum dan ekonominya.

4. Sumber dan jenis data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu :

a. Data primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya³⁹ atau yang diperoleh dari masyarakat⁴⁰; berupa tindakan, informasi dari pihak-pihak yang terlibat dengan bank syariah. Data ini diperoleh melalui informan yang dipilih secara *purposive*. Informan, secara umum, oleh Spradley disarankan untuk memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya;
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;

³⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal 167

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hal 93

⁴⁰ Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal 10

3. Mereka yang mempunyai kesempatan/waktu yang memadai untuk diminta informasi;
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri; dan
5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" akan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam "guru" atau narasumber.⁴¹

Penentuan informan awal dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang memahami dan menguasai permasalahan perbankan syariah baik dari aspek hukum maupun ekonomi, (2) masyarakat baik yang menjadi nasabah bank syariah maupun yang tidak.

b. Data sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan pustaka dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴² Dalam penelitian ini bahan pustaka yang digunakan meliputi: dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundangan (hukum positif Indonesia) maupun Al Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas para ulama, yang merupakan sumber hukum Islam termasuk didalamnya berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam,

⁴¹ Sanapiah Palsal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang, 1990), hal 44

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 23

kelompok studi ekonomi Islam dan hasil-hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu, melalui *observasi*, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

a. Tahap orientasi awal

Dilakukan studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir Peraturan Perundangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga dilakukan *observasi*⁴³ awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum dan relative menyeluruh tentang obyek permasalahan yang diteliti.

b. Tahap orientasi terfokus

Pada tahap ini dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara merupakan teknik penelitian yang paling sosiologis dari

⁴³ S Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal 73

semua teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden.⁴⁴

c. Tahap studi kepustakaan

Yaitu meneliti berbagai kepustakaan serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang berupa rekaman tape recorder, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang dibuat sebelumnya.

7. Teknik pengecekan keabsahan data

Untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵

8. Teknik analisa data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁴ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Eresco, 1992), hal 305

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2002), hal 179

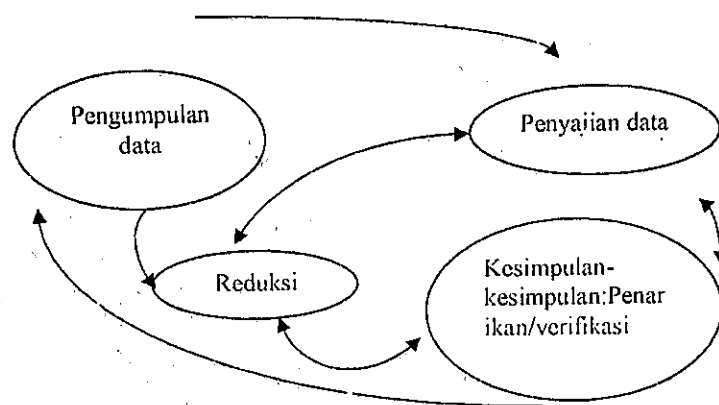
- a. Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal. Dalam tahap ini terutama peneliti melakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan perbankan dan bank syariah pada khususnya. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap seluruh asas-asas dan kaidah yang terkumpul tersebut.
- b. Tahap kedua yang mendasarkan pada penelitian non doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama, dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* data dan *reduksi* data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan **Matthew B. Miles** dan **A. Michael Huberman**, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data.

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

'kasar' yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah suatu 'penyajian' sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁶ Dibawah ini dapat disampaikan dalam bentuk bagan penyajiannya sebagai berikut⁴⁷:



G. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun sebagai berikut:

Uraian yang ada pada dalam Bab I terdiri dari; latar belakang masalah, permasalahan, acuan teoritis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan uraian tentang teori-teori yang digunakan dan mengapa teori tersebut diajukan acuan, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian,

⁴⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal 16-18

⁴⁷ Ibid, hal 20

spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

Pada bab II akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam kerangka analisis. Pada bab ini diberi judul Tinjauan Pustaka, hal-hal yang diuraikan tentang perkembangan lembaga perbankan nasional, kehadiran bank syariah di Indonesia dan sistem operasional bank syariah

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum wilayah studi di kota Semarang. Disamping itu, dalam bab ini akan mencoba menganalisis dari aspek hukum dan ekonomi Islam dari posisi, faktor pendukung dan penghambat operasional, perkembangan hukum perbankan syariah, prospek dan strategi pengembangan bank syariah. Disamping itu, dalam bab ini akan mencoba menganalisis dari aspek hukum dan ekonomi Islam dari kegiatan, perkembangan dan prospek bank syariah serta memahami dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat dan solusinya

Sedangkan pada bagian akhir Tesis ini adalah Bab IV, yang biasanya disebut sebagai penutup, yang berisi kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dan juga saran-saran serta rekomendasi berdasarkan temuan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERKEMBANGAN LEMBAGA PERBANKAN NASIONAL

1. Industri Perbankan

Perbankan merupakan lembaga bisnis yang usahanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Bank mempunyai fungsi utama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang merupakan suatu amanat pembangunan bangsa untuk peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁸

Kegiatan industri perbankan di Indonesia pada saat ini diatur di dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan yaitu Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004. Undang-Undang perbankan ini telah diikuti oleh berbagai peraturan pelaksana, baik dalam bentuk peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Surat Edaran Menteri Keuangan Keputusan Direksi Bank Indonesia maupun Surat Edaran BI Misalnya PP No. 68 tahun 1996 yang telah diubah dengan PP No. 40 tahun 1997 tentang ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Liquidasi bank.

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2003), hal 3

Menurut UU No. 7 tahun 1992 jo. UU. No. 10 tahun 1998 di Indonesia hanya ada 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan bunga dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Di samping lembaga perbankan, sebenarnya masih ada lembaga keuangan yang tugasnya juga memfasilitasi dana masyarakat yaitu penanaman modal dan investasi langsung seperti property, asuransi dan lain-lain.

Bank mempunyai kaitan erat dengan dunia usaha serta pasar uang dan pasar modal dalam arti luas. Kegiatan bank dilakukan melalui aktivitas pokoknya dalam menarik dana masyarakat dan memberikan kredit maupun melalui aktivitasnya dalam perdagangan surat-surat berharga dan jasa-jasa.

Sesuai pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 perbankan di Indonesia berdasarkan demokrasi Ekonomi disesuaikan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Konsep demokrasi ekonomi di Indonesia adalah suatu sistem pasar yang terkendali, yaitu dikendalikan oleh Pancasila dan UUD 1945.⁴⁹

Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, masyarakat harus pegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan,

⁴⁹ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hal 6

Pemerintah harus memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.⁵⁰

Pasal 3 UU No.7 tahun 1992 menyebutkan tugas utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat dengan cara merapatkan dirinya diantara penabung dan investor. Dengan berbagai cara bank mencocokkan kebutuhan yang berbeda dari kedua kelompok itu. Secara agak terinci dari segi ini, tugas bank adalah⁵¹:

- a. Tugas menghimpun dana
- b. Tugas pemberian kredit
- c. Tugas memperlancar lalu lintas pembayaran
- d. Tugas sebagai media kebijakan moneter.
- e. Tugas sebagai penyedia informasi
- f. Tugas pemberian konsentrasi
- g. Tugas bantuan penyelenggaraan administrasi.

Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 menyatakan tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang dalam rangka menyatakan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengadaan mengenai prinsip kehati-hatian itu diharapkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melalui kepentingan nasabah pada khususnya dan menunjang ke sistem ekonomi pada umumnya yang akhirnya dapat terwujud suatu stabilitas nasional.

⁵⁰ Rochmat Soemitro, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, (Bandung : Erisco, 1991), hal 185

⁵¹ Nindyo Pramono, *"Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat"*, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hal 6

2. Perbankan Di Indonesia

2.1 Pengertian Bank

Istilah “bank” berasal dari kata Italia “banco” yang berarti “kepingan papan tempat buku “sejenis meja”. Kemudian penggunaanya lebih diperluas untuk menunjukkan “meja” tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang Valuta di Eropa, pada abad pertengahan untuk memamerkan uang mereka. Dari sinilah awal mula timbulnya perkataan bank.⁵²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan menjelaskan pengertian bank dan perbankan adalah sebagai berikut :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁵³

Menurut Jerry M Rosenberg pengertian bank dalam *Dictionary of Banking & Finance* yaitu

Bank: is an organization normally a corporation chartered by the state or federal government, the principal functions of which are : (a) to receive demand and time deposits, honor instruments drawn against them, and pay interest on them as permitted by law, (b) to discount notes, make loans, and invest in government or other securities, (c) to collect checks,

⁵² Muhammad Muflehuddin, *Banking and Islamic Law-Sistem Perbankan Dalam Islam*, Penerjemah Aswin Sinamora, (Jakarta : Rineka Cipta , 1994), hal 1

⁵³ Baca Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

*drafts, notes, etc, (d) to issues drafts and cashier's checks, and (e) to certify depositor's checks and (f) when authorized by a chartering government to act in fiduciary capacity.*⁵⁴

Menurut **Abdurrahman**, perbankan adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, serta efek-efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan.⁵⁵ Sedangkan **Sentosa Sembiring** menyatakan bahwa *bank* adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri pada pihak ketiga.⁵⁶

Menurut **O.P. Simorangkir** pengertian bank diartikan sebagai :

“Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.⁵⁷

Menurut **Malik Marhainis Abdul Hay** bank menurut hukum diartikan sebagai subyek hukum (*recht persoon*), sehingga bank dapat membuat perikatan-perikatan (*verbintenissen*) atau perjanjian (*overkomst*) baik dengan bank lain, ataupun perusahaan-perusahaan maupun dengan individu.⁵⁸

⁵⁴ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal 17

⁵⁵ Abdurrahman, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal 1

⁵⁶ Abdurrahman, dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hal 13

⁵⁷ O.P Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal 1

⁵⁸ Malik Marhainis Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*. (Jakarta : UPN Veteran, 1983), hal 3

2.2 Jenis-Jenis Bank di Indonesia

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 jenis bank dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu :

- a. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵⁹

Lembaga perbankan di Indonesia, dapat dibagi dan digolongkan menjadi sebagai berikut :

1. Dilihat dari Bidang Usahanya

Bank ditinjau dari bidang usahanya ada dua jenis yaitu :

- a. Bank Umum, mempunyai dua bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3)).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR mempunyai dua bentuk yaitu BPR dan BPR Syariah. *Bank Perkreditan Rakyat* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 ayat (4)).⁶⁰

2. Dilihat dari Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 4 golongan yakni:

⁵⁹ Baca Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶⁰ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 3-7

1. Bank Umum Milik Negara yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan UU.
2. Bank Umum Swasta yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan BI.
3. Bank Campuran yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bank Milik Pemerintahan Daerah, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintahan daerah.⁶¹

3. Dilihat dari segi Fungsi dan Tujuan Usahanya

Dilihat dari segi fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu :

1. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai *bankers* bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
2. Bank umum (*Commercial bank*), yaitu bank baik milik Negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapat keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada Depositor (*spread*).
3. Bank tabungan (*Saving bank*), yaitu bank baik milik Negara, swasta, koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan (*Development bank*), yaitu bank baik milik Negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang sedangkan usahanya terutama

⁶¹ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 2003), hal 58-59

memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.⁶²

4. Dilihat dari Segi Operasionalnya

Dilihat dari lingkup operasionalnya, maka bank dapat digolongkan dalam 2 golongan, yakni :

1. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Bank Non Devisa, yaitu bank tidak dapat melakukan kegiatan usaha di bidang transaksi valuta asing.⁶³

5. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Dilihat dari segi menentukan harga, terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

1. Bank Berdasar Prinsip Konvensional
 Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :
 - Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*.
 - Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya nominal atau persentase tertentu. System pengenaan ini disebut *fee based*.
2. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)
 Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut :
 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

⁶² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996, hal 83-84

⁶³ Sentosa Sembiring, *Op Cit*, hal 7

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁶⁴

2.3 Fungsi Perbankan

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus, tidak hanya seperti apa yang menjadi fungsi bank pada umumnya, fungsi bank yang lain menurut Muhammad Djumhana adalah :

“Diarahkan sebagai agent pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”⁶⁵

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, dijelaskan fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpunan dana, penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti kehadiran perbankan tidak semata-mata bertujuan bisnis tetapi ada misi yang lain yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ruddy Tri Santoso, fungsi dan tujuan utama pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *agent of development* (bank milik Negara) dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* dilakukan oleh

⁶⁴ Kasmit, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal 23-25

⁶⁵ Muhamad Djumhana, *Op Cit*, hal 86

bank pemerintah terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpunan dan penyalur dana.⁶⁶

Menurut **Bambang Sunggono**, ditinjau secara umum, bank dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Pencipta uang
- b. Menampung uang masyarakat
- c. Sebagai penyalur uang ke masyarakat
- d. Sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa⁶⁷

3. Restrukturisasi Perbankan

Ada tiga komponen kebijaksanaan dalam rangka restrukturisasi perbankan yang secara signifikan telah mengubah sistem hukum perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yaitu pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penyediaan program penjaminan pemerintah dan program rekapitalisasi perbankan. Ketiga kebijakan ini diadakan dengan maksud untuk secara langsung mengatasi krisis perbankan disamping menjadi pedoman arah kebijakan pengaturan hukum perbankan nasional, yaitu bahwa di satu sisi bertujuan untuk memelihara tingkat kesehatan bank dan di sisi lain meminimalkan tingkat kegagalan bank, baik yang bersifat individual bank maupun yang bersifat sistemik. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional terutama karena tersedianya tahapan penyelenggaraan

⁶⁶ Ruddy Tri Santosa, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1996), hal 2

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung, Mandar maju, 1995), hal 11

pembinaan bank yang jelas sampai ke tingkat *exit policy* yang bersifat melindungi penyimpanan dana dalam batas-batas tertentu.⁶⁸

Pemerintah dan Bank Indonesia telah melaksanakan Restrukturisasi Perbankan yang ditujukan untuk : yaitu

- a. Menyongsong pemulihan perekonomian nasional, hal-hal yang ingin dicapai adalah :
 1. Memperkuat kelembagaan bank dengan langkah-langkah:
 - a. Melaksanakan rekapitalisasi bank-bank yang *under capital*
 - b. Membentuk lembaga penjaminan simpanan nasabah
 - c. Mengubah definisi rahasia bank agar tidak semua informasi dalam bank adalah rahasia
 - d. Memberi kesempatan kepada investor asing untuk ikut memiliki bank-bank nasional.
 2. Memperluas jangkauan pelayanan bank dengan langkah-langkah :
 - a. Memperluas pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil khususnya oleh BPR diberi kebebasan luas untuk menjangkau nasabah tanpa pembatasan wilayah.
 - b. Memperluas jangkauan pelayanan bank bagi warga masyarakat yang tidak mau berhubungan dengan bank yang menggunakan sistem bunga, dengan mengembangkan bank berdasarkan prinsip syariah
 3. Melaksanakan *prudent banking*, dengan menetapkan dua langkah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengulangi penyelenggaraan perbankan yang tidak *prudent* perlu diatur *law enforcement* yang tegas dalam Undang-Undang termasuk adanya sanksi atas pelanggaran *prudential banking*.
 - b. Memberikan otonomi kepada Bank Indonesia dalam mengawasi bank-bank.
- b. Menyelesaikan persoalan bank-bank bermasalah yang telah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu.⁶⁹

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, (Jakarta : 2002), hal 45

⁶⁹ Direktorat Hukum Bank Indonesia, "Beberapa Permasalahan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", dalam MARI, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, (Jakarta : 2002), hal 45

B. KEHADIRAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

1. Berlakunya Sistem Perekonomian Islam

1.1 Islam Sebagai Way of Life

Secara konseptual, Islam adalah agama (*ad-din*) yang praktis dan mengandung segala kebaikan diperuntukkan bagi manusia. Islam memberi tuntunan kepada manusia kearah jalan kehidupan yang sempurna dan bebas dari kelemahan agama-agama lain. Kesempurnaan agama Islam itu tercermin dalam Firman Allah SWT yang artinya :

"Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. (QS AlMaidah : 3)

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan agama Islam dengan semua unsur petunjuk kehidupan baik dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya. Substansi ajaran Islam itu terdiri dari 3 komponen yaitu aqidah (teologi Islam), akhlaq (sistem etik dan estetika Islam) dan syariah⁷⁰ (sistem hukum Islam).⁷¹

Syariah Islam yang sempurna dan diberi legitimasi (*diridloi*) oleh Allah SWT itu dikarenakan tidak akan ada syariah lain yang datang untuk

⁷⁰ Syariah secara etimologis berarti jalan yang harus ditempuh dan secara teknis syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan benda beserta alam lingkungan hidupnya.

⁷¹ M Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal 30

menyempurnakan mengingat Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya para Rasul yang tidak ada rasul lain sesudahnya. Oleh karena itu syariah Islam mempunyai karakter komprehensif dan universal. Komprehensif artinya meliputi seluruh aspek kehidupan baik ibadah (ritual) maupun muamalah (sosial). Universal berarti dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang diterapkan Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan aqidah dan akhlak. Dalam bidang muamalah, syariah hanya memberikan prinsip-prinsip pokok yang ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga bersifat fleksibel dan terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad.⁷²

Hakekat hukum Islam tiada lain adalah syariah yang bersumber dari Qur'an dan Hadist. Pondasi pokok dalam Islam adalah konsep tauhid dalam struktur hukum Islam, yaitu hubungan bidimensional *hablun min annas, amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*, taqwa dan bijaksana, mendahulukan kewajiban dari pada hak dan kewenangan.⁷³

⁷² Ijtihad artinya upaya seorang ahli hukum mengerahkan seluruh kemampuan dan potensinya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.

⁷³ HM Taher Azhary, "Hukum Islam Dalam Era Puncak Modernisme", *Mimbar Hukum*, No. 15 Thn V 1994. Lihat juga HM Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip - Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hal 23

Pengertian prinsip syariah dalam sistem operasional bank syariah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan barang (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah wa iqtina*)”.

1.2 Prinsip Syariah Tentang Harta dan Ekonomi

1.2.1 Kepemilikan atas Harta Merupakan Amanah

Islam memandang bahwa bumi dan langit dengan segala isinya adalah merupakan amanah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifahNya agar digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT di samping memberikan sarana kehidupan berupa alam lingkungan sebagaimana firmanNya dalam QS Al Luqman : 20, yang artinya :

“Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.

Oleh karena itu hak milik di dalam Islam mempunyai nilai sosial dan bersifat relatif. Mempunyai nilai sosial karena dasarnya yang ada di bumi dan langit ini adalah milik Allah SWT, darimana didapatkan dan untuk apa harta tersebut, sebagaimana hadist Rasulullah:

*"Seseorang pada akhir nanti pasti akan ditanya 4 (empat) hal : usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan".
(HR. Abu Dawud)*

Allah SWT menjadikan harta sebagai hak milik-Nya kemudian harta itu diberikan kepada orang yang dikehendaki untuk dibelanjakan kepada jalan Allah, karena Allah memberikan harta untuk menguasai bukan sebagai hak miliknya.⁷⁴

Sikap Islam terhadap harta adalah bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dalam memandang dunia, Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang, Islam tidak condong pada paham yang menolak dunia secara mutlak, yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan. Islam juga tidak condong kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan dan pujaan.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989), hal 32

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1977), hal 72

1.2.2 Harta Merupakan Kebutuhan Sekaligus Ujian

Harta menjadi perhiasan hidup yang dibutuhkan tetapi sekaligus menjadi ujian bagi keimanan pemiliknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali Imran : 14 yang artinya :

"Dihiaskan bagi manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik".

Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan keangkuhan dan kesombongan sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Alaq : 6-7 yang artinya :

"Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup".

Islam mencela dengan sangat keras kepada orang-orang yang hanya menumpuk harta kekayaan tetapi tidak peduli dengan nasib penderitaan orang lain, sebagaimana QS Al Humazah : 1-4. yang artinya

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungannya (kikir), dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka huthamah."

Sementara itu, ketiadaan harta (papa nestapa) cenderung menjerumuskan ke dalam kekufuran sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : *"Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran"*.

1.2.3 Usaha Yang Halal dan Baik

Perekonomian pada prinsipnya untuk kesejahteraan manusia seluruhnya dan menjaga keseimbangan antara unsur material dan spiritual berdasarkan keadilan dan persaudaraan, sebagaimana firman Allah SWT;

"Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam". (QS Al-Anbiya: 107).

"Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS As Syura: 183).

Oleh karena itu, usaha mencari rizki harus dilakukan melalui cara-cara yang halal dan terpuji. Banyak ayat Al Quran dan Hadist yang memerintahkan untuk mencari rizki yang halal.

QS Al Baqarah : 168 menyebutkan :

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

QS Al Maidah : 87-88, artinya :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya."

Ayat-ayat diatas mendorong manusia untuk berusaha mencari harta atau rizki dengan cara-cara yang halal. Ketentuan mengenai cara berusaha mencari rizki sifatnya terbuka sesuai dengan kreatifitas manusia, batasannya adalah halal dan haramnya sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang artinya :

"Kaum muslimin terikat dengan perjanjian atau kesepakatan mereka, kecuali perjanjian atau kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"
(HR Tirmidzi).

Azas umum dalam hubungan muamalah (perdata) adalah "Pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali perbuatan itu telah ada larangan dalam AlQuran dan Sunnah Nahi". Azas ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya:

"Apa saja yang telah Allah halalkan adalah halal dan apa yang telah Allah biarkan, maka itu adalah kemurahan dari

*Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan lupa atas sesuatu".
(HR. Thabrani)⁷⁶*

Allah SWT telah menjelaskan pokok-pokok muamalah kehartabendaan yang adil dengan dua prinsip yaitu melarang memakan makanan dengan cara batil dan saling merelakan⁷⁷, sebagaimana QS An-Nisa : 29 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu senang memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

2. Beberapa Pandangan Islam Terhadap Riba dan Bunga

Menurut Tarek El-Diwany Islam mendefinisikan dua bentuk penting bunga. Secara umum praktek bunga tersebut adalah *Riba al qarud* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. Praktek kedua jenis bunga tersebut adalah lazim dilakukan oleh orang Arab pada zaman Rasulullah mengingatkan para sahabatnya bahwa bunga dapat muncul dalam banyak bentuk yang lain.⁷⁸

⁷⁶ Jalaludin as Suyuthi, *Al-Asybah Nadhair*, (Beirut : Darul Fikri, 1995), hal 44

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaifullah Maksuun et al, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hal 129

⁷⁸ Tarek El-Diwany, *The Problem With Interest Sistem Bunga Dan Permasalahannya*, Terjemahan oleh Amdiar Amir, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2003), hal 171

Beberapa pandangan Islam dan ulama terhadap riba dan bunga :

1. Riba secara etimologis bermakna *ziyadah* (tambahan), secara linguistik riba juga berarti bertambah dan membesar.
2. Istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara batil.⁷⁹
3. Menurut **al Maududi**, **Ibnu al-Arabi** menafsirkan kata batil dalam ayat QS An Nisa' : 29 adalah riba yang diartikan sebagai "*Suatu tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah*".⁸⁰
4. **Imam Nawawi** dalam *Majmu Syarah Muhadzdzab* menyitir pendapat **al Mawardi** yang mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyah berbeda dalam dua pendapat ketika menafsirkan ayat al-Quran yang mengharamkan riba. Pertama, bahwa larangan itu bersifat global yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah menjadi *riba nuqud* dan *nasiah*. Kedua, bahwa larangan riba dalam Al Quran itu adalah *riba nasiah* yang biasa diperjanjikan waktu zaman jahiliyyah yang meliputi penambahan atas harta pokok dikarenakan unsur waktu, kemudian sunnah Nabi mengharamkan *riba nuqud* yang dikaitkan pada larangan Al Quran tersebut.⁸¹
5. **Imam Ahmad bin Hambal** ketika ditanya tentang riba menyatakan bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang mempunyai hutang lalu ditanyakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi ia harus menambah dana atas setiap penambahan waktu yang diberikan.⁸²

Dari beberapa pandangan tentang riba seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam dengan persyaratan bunga berdasarkan tenggang waktu yang diberikan untuk pembayarannya dinamakan *riba nasiah*. *Riba nasiah* ini larangannya dinyatakan oleh nash QS Al Baqarah ayat 275 yang artinya :

⁷⁹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal 37

⁸⁰ Abu al- A'la al-Maududi, *Op Cit*, hal 80-81

⁸¹ An-Nawawi, *Majmu Syarah al Muhadzdzab*, jilid IX, (Kairo : Zakariyah Ali Yusuf, tt), hal

442

⁸² Ibnul Qoyyim al Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqin'in*, juz II, tt,tt, hal 132

"Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran sakit gila. Keadaan mereka itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dan juga QS Ali Imran : 130, yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan"

Disamping riba nasiah ada riba yang disebut :

1. *Riba qordli* yaitu riba yang disyaratkan terhadap orang yang berpiutang
2. *Riba jahiliyyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak membayar pada waktu yang ditetapkan.
3. *Riba fadhl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.⁸³

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi. Dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.

Dalam Kitab perjanjian lama :

"Jika kamu mengqiradhkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan: jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu". (Ayat 25 pasal 22 Kitab Keluaran)

Dalam Kitab perjanjian baru disebutkan :

"Jika kamu mengqiradkan kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan qiradkanlah tanpa mengharapkan

⁸³ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta : 1999), hal 63-64. Selanjutnya disingkat Syafii II

pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah" (Ayat 34-35 pasal 6 Injil Lukas)⁸¹

Sekalipun pengertian dan larangan riba sudah jelas atau shahih, namun dalam menanggapi jasa perbankan konvensional yang didasarkan pada sistem bunga, sebagaimana ulama membolehkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁸⁵

- a. Keadaan darurat
- b. Yang diharamkan adalah bunga yang berlipat ganda dan bersifat dhalim, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendhalimi hukumnya boleh.
- c. Bank sebagai lembaga tidak termasuk kategori *mukallaf*.

Yang sering menjadi acuan sementara kalangan ialah pakem ulama fikih dalam menentukan makna riba dengan berpegang pada hadits "*Setiap pinjaman yang mengakibatkan pertumbuhan adalah riba*".⁸⁶

Selain pandangan konservatif yang mengharamkan riba secara mutlak dan pandangan pragmatis yang menghalalkan bunga bank konvensional karena tidak berlipat ganda. Terdapat pula pandangan sosio ekonomis yang menyatakan bahwa modal di dalam Islam merupakan faktor produksi, sehingga untuk mendapatkan keuntungan perlu pembebanan risiko melalui cara bagi hasil dan bukan melalui pembebanan bunga.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Almaarif, 1997), hal 117-118.

⁸⁵ Ibrahim Husein, "Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam", Makalah dalam Workshop on Bank and Banking Interest, Safari Garden Hotel, Cisarua, 1990, hal 19-22

⁸⁶ Yusuf Qordhowi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram (Bunga Bank Haram)*, Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal 57

Lajnah Bahtsul Masail NU dalam sidanganya di Bandar Lampung (1982) menyimpulkan tentang masalah bunga bank konvensional sebagai berikut :

- a. Ada pendapat yang mempersamakan bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- c. Ada pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya *syubhat* (meragukan).⁸⁷

Majelis Tarjih dalam sidanganya di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan tentang masalah bunga sebagai berikut :

- a. Riba hukumnya haram, dengan nash shahih Al Quran dan As Sunnah
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram, bank tanpa riba hukumnya halal.
- c. Bunga yang diberikan oleh bank milik Negara kepada nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara musytabihat.
- d. Menyarankan kepada pengurus pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.⁸⁸

3. Kebutuhan Terhadap Pembentukan Bank Syariah

Pandangan yang tidak dapat menerima bunga bank konvensional dengan alasan bertentangan dengan syariat Islam, sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada

⁸⁷ Aries Mufti, *Bunga Bank : Maslahat Atau Muslihat?*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2004), hal 29

⁸⁸ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal 19

asas *profit and loss sharing* (Bagi hasil) dipandang sebagai sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara kolektif gagasan berdirinya bank Islam ditingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969. Konferensi yang diikuti 19 negara peserta itu memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tiap (usaha mencari) keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara bank Islam belum berdiri, bank-bank yang memakai bunga masih diperbolehkan untuk beroperasi hanya apabila benar-benar dalam keadaan darurat.⁸⁹

Pada sidang menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi Pakistan pada tahun 1970, menteri Luar Negeri mengusulkan proposal untuk mendirikan bank syariah. Dalam proposalnya tersebut Mesir mengusulkan konsep perekonomian dan perbankan di Negara-negara Islam, antara lain untuk :

- a. Mengatur transaksi komersial antar Negara Islam
- b. Mengatur institusi pembangunan dan investasi
- c. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antar bank sentral di Negara-negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu.
- d. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di Negara Islam

⁸⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 1999), hal 4

- e. Mendukung upaya-upaya bank sentral syariah di negara-negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan syariah Islam.
- f. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat.
- g. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral Negara Islam⁹⁰

Setelah beberapa kali dibahas, akhirnya sidang menteri keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 menyetujui rancangan pembentukan *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal 2 milyar dinar dan semua Negara anggota OKI menjadi anggota IDB. Bank ini memberi pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada Negara anggota berdasarkan partisipasi modal Negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan prinsip *murabahah* dan *ijarah*.

Setelah terbentuknya IDB di berbagai Negara Islam termasuk Indonesia bank syariah menjadi kebutuhan khususnya bagi masyarakat muslim. Pada tahun 1991 berdiri bank syariah sebagai pionir bank syariah di Indonesia. Kehadiran bank syariah telah ditunggu jauh sebelumnya yang didukung oleh ormas Islam NU dan Muhammadiyah.

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Amonio, *Op Cit*, hal 19-20

C. SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH

1. Konsep Dasar Dan Pengertian Bank Syariah

Konsep Dasar Bank Syariah didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Prinsip – prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip *Al – Wadiah* (Simpanan) : ⁹¹

a. Pengertian

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya ke bank, pihak bank harus menjaga titipannya tersebut dan mengembalikan apabila si nasabah menghendaki.

b. Dasar Hukum

Al-Quran

- QS. AnNisa : 58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

- QS. Al Baqarah : 283

"...sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (ulangnya)..."

Hadist

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda

"Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci" (HR. Thabarani)

⁹¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2000),Hal.49

"Bayarkanlah (kembalikanlah) petaruh barang titipan itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu." (HR Abu Hurairah)

Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma (konsensus) akan legitimasi *Al Wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *Al-Fiqh Al-Islami* "wa Adillatuhu dari Mughni wa Syah Kabir Li Ibni Qudamah dan *Al Mabsuth Li Imam Sarakhsy*".

2. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini terdiri dari :

a. *Al Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

a. Pengertian

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antar pihak-pihak tersebut yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal segala kerugian dilakukan sesuai dengan modal masing-masing.⁹²

b. Dasar hukum

Al- Quran

- (QS AnNisa : 12)

⁹² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah-Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), hal 25

"Jikaan saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."

- (QS. Ash-Shad : 24)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh"

Hadist

Dalam hadist kudsii yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda "Allah SWT telah berkata kepada saya mengenai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya rahmat Allah SWT tercurahkan atas kedua belah pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka hisnisnya akan tercela dan keberkatannyapun akan sirna dari padanya.

Ijma'

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.

b. *Mudharabah*

a. Pengertian

Yaitu bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui.⁹³

b. Dasar Hukum

Al-Quran

- QS. Al Muzammil:20

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT."

- QS. Al Baqarah : 198)

"Tidak ada dosa halangan bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu."

Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitranya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Beliaupun memeperkenankan. (HR. Thabrani)

⁹³ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economy : Theory & Practice-Ekonomi Islam : Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Terjemahan M. Nastangin, (yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal 168

c. *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*

a. Pengertian

Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase dari hasil panen).⁹⁴

b. Dasar Hukum

Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman dari padanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muzara'ah dengan ratio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:2/3, maka Rasulullah pun bersabda "Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya."

Ijma'

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara Muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad Bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qosim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan Ali"

⁹⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hal 271

d. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)*

a. Pengertian

Adalah bentuk yang sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁹⁵

b. Dasar Hukum

Hadist

Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*) dan Margin Keuntungan

Bentuk jasa yang berdasarkan konsep ini adalah:

a. *Murabahah*

Persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan ini juga meliputi cara pembayaran sekaligus.⁹⁶

⁹⁵ Muhammad Syaffi Antonio, *Op Cit*, Hal. 100

⁹⁶ Amrullah Ahmad dkk, Penyunting, *Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta : PLP2M, 1985), hal 142

b. Al-Bai'u Bithaman Ajil

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Dasar Hukum *Al-Murabahah* dan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* adalah :

Al Quran :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An Nisa:29)

Hadist

Dari Suhaeb ra. Bahwa Rasulullah bersabda "Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan yaitu (1) menjual dengan membayar secara kredit, (2) murabahah, (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual" (IIR Ibnu Majah)

c. Bai' Al Istishna'

Adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada. Hal ini hampir sama dengan Murabahah, hanya saja dalam istishna', bank memesan suatu barang tertentu dari produsen atas nama nasabah, manakala murabahah bank membeli atas pesanan nasabah.⁹⁷

⁹⁷ Mulamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), Hal. 33

4. Prinsip Sewa (*Al Ijarah*)

Bentuk ini digolongkan menjadi :

Al Ijarah dan Al Tajri

a. Pengertian

Al Ijarah yaitu ⁹⁸ akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Setelah masa sewa berlangsung maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan *Al Tajri* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum *Al Ijarah* dan *Al Tajri*

Al Quran

- QS. Al Qasas 26

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata "*Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*"

⁹⁸ Muhamad Syaifi Antonio, *Op.Cit*, Hal 117

Hadist

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah bersabda "Berikanlah upah kepada buruh tersebut sebelum kering keringatnya"(HR. Ibnu Majah)

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

1. Al Kafalah

Menurut ketentuan syara' kafalah ini diartikan sebagai "proses penggabungan kafil menjadi tanggungan ahli dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau utang, atau barang atau pekerjaan".⁹⁹

Dasar Hukum

Al Quran

"Pegawai-pegawai itu berseru kami kehilangan piala raja siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (QS Yusuf:72)

Hadist

"Dikutip dari sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW telah dihadapkan mayat seorang lelaki kepadanya untuk disembahyangkan. Rasulullah bertanya, apakah ia punya warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia punya hutang sahabat menjawab ya, sejumlah 2 dinar. Rasulullahpun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tapi ia sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qaradah berkata "Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah" maka Rasulullahpun menshalatkannya.(HR. Bukhari)

⁹⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), Hal. 148

2. *Al-Hiwalah*

Adalah jasa bank memindahkan hak utang piutang, mengalihkan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain.¹⁰⁰

Dasar Hukum

Hadist

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasu' telah bersabda "Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, apabila salah seorang diantaramu diminta untuk dialihkan pembayaran utangnya kepada yang berkemampuan, maka terimalah." (HR Muslim)

3. *Al-Jualah*

Yaitu perjanjian dimana pihak pertama berjanji untuk memberi sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua (amil) atas suatu usaha / layanan proyek yang sifat dan batasannya tercantum di perjanjian.¹⁰¹

Dasar Hukum

Al-Quran

Pegawai-pegawai itu berkata : kami kehilangan piala raja dan barangsiapa dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf:72)

¹⁰⁰ Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), hal 415

¹⁰¹ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal

4. *Al Wakalah*

Yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga, dalam hal ini bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh *fee* sebagai imbalannya. Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa dinamakan "*muwakil*" kepada penerima kuasa, yang dinamakan wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.¹⁰²

Dasar Hukum

Al Quran

Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. (QS Al Kahfi:19)

Maka jikalau kamu khawatirkan ada persengketaan diantara keduanya maka kirimkanlah salah seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS.AnNisa:35)

5. *Al-Sharf*

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama.

Dasar Hukum

Hadist

Dari Ubaidah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda emas harus ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, jelai dengan jelai, gandum

¹⁰² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hal 36

dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam dalam takaran yang sama dan tunai, apabila jenisnya berbeda maka tukarkanlah sesuai anda asalkan dilakukan secara tunai. (HR. Jamaah kecuali Bukhari)

Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah bank Islam. Secara akademik istilah islam dengan syariah adalah berbeda sekali. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai arti sama.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam¹⁰³. Selain itu dalam beroperasinya bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, sehingga bisa disebut bank tanpa bunga.¹⁰⁴

Berdasarkan rumusan diatas maka bank Islam adalah bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami yakni berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi

¹⁰³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LPPI), 2001), hal 5

¹⁰⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), Hal. 1

dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁰⁵

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Bank Islam merupakan bank yang menerapkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.¹⁰⁶ Bank Islam juga bukan saja dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan pada bank konvensional karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan non bank. Bank Islam adakalanya juga melakukan fungsi sosial (*Charity*) yang biasanya tidak dilakukan oleh bank konvensional yang berorientasi "*profit oriented*" misalnya fasilitas pembiayaan yang disebut *Al-Qardhu Hasan* yaitu pinjaman tanpa imbalan apapun hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama seperti yang dipinjamkan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwatatmadja, *Op Cit*, Hal. 1-2

¹⁰⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Op Cit*, Hal. 1

¹⁰⁷ *Loc. Cit*

2. JENIS JASA

2.1. PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

Bank merupakan lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Dilihat dari fungsi pokok bank Syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

Ketiga fungsi tersebut adalah :

- Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)
- Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)
- Pelayanan Jasa

Sesuai dengan fungsinya, bank syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ke masyarakat.

Penghimpunan Dana

a. *Giro wadiah*

Yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Setiap mengambil nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaat dana giro oleh bank (titipan murni).

b. *Tabungan Mudharabah*

Yaitu dana yang disimpan nasabah dikelola oleh bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

c. *Deposito Investasi Mudharabah*

Yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan hanya pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan dengan menerapkan sistem bagi hasil.¹⁰⁸

d. *Tabungan Haji Mudharabah*

Yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰⁹

e. *Tabungan Qurban*

Yaitu simpanan pihak ketiga yang dikumpulkan untuk ibadah qurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan qurban atau pada saat tertentu yang disepakati bersama.¹¹⁰

Penyaluran Dana

a. *Pembiayaan Al Mudharabah*

Yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan

¹⁰⁸ Warkum Sumitro, *Op.cit.*, Hal.83-84

¹⁰⁹ A Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jnkarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal 72

¹¹⁰ Muhamad (Editor), *Bank Syariah Analisis: Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), hal 19

kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.¹¹¹

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Yaitu suatu perjanjian dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan usaha/ kegiatan tertentu sedangkan yang lain disediakan oleh mitra usaha. Dalam hal ini bank dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan dalam menentukan prosentase keuntungan bagi masing-masing pihak dan juga apabila mengalami kerugian juga dapat ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹²

c. Pembiayaan *Al-Murabahah*

Adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹³

d. Pembiayaan *Al- Bai'u Bithaman Ajil*

¹¹¹ Nejetullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law-Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam Seri Ekonomi Islam No. 5*, Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal 8

¹¹² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung, Mandar Maju, 2002), hal 104

¹¹³ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), Hal 66

Yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pembayaran oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran / cicilan sesuai oleh waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank. Lazimnya kredit ini jangka waktunya lebih lama dibanding dengan pembiayaan murabahah. Sedangkan keuntungan dari bank didapat dari harga barang yang dinaikkan dari harga pembelian.¹¹⁴

e. *Pembiayaan Al-Qardhul Hasan*

Adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.¹¹⁵

f. *Pembiayaan Al-Ijarah dan Al-Bai'u Al-Tajiri*

Yaitu perjanjian sewa menyewa yang biasanya digunakan dalam leasing baik secara sewa murni (*operating lease*) maupun secara sewa beli (*finance lease*). Menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank tetapi harus melalui anak perusahaan.¹¹⁶

¹¹⁴ Warkum Sumitro, *Op Cit*, Hal 96

¹¹⁵ Murza Gumil, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), Hal 70

¹¹⁶ Muhamad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hal 98-99

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan berkenaan dengan perkembangan hukum perbankan syariah di kota Semarang di Kantor Bank Indonesia Semarang, Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang, Bank Muamalat Cabang Semarang, BRI Syariah Cabang Semarang Tokoh MUI Jateng, ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. POSISI BANK SYARIAH DENGAN ADANYA FATWA HARAM (STUDI DI KOTA SEMARANG)

1. Latar Sosial Setting Wilayah Penelitian Kota Semarang

1.1 Letak Geografis

Kota Semarang adalah pusat ibukota propinsi Jawa Tengah yang letaknya hampir berada di tengah dari daerah-daerah di propinsi Jawa Tengah. Kota Semarang, terletak di antara garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur, yang dibatasi sebelah Barat dengan kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan di sebelah Utara oleh laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.¹¹⁷

¹¹⁷ BPS, *Kota Semarang dalam Angka*, 2003, h. 1

Letak kota Semarang hampir berada di tengah bentangan panjang Kepulauan Indonesia dari arah barat ke timur. Akibat letak geografis tersebut, kota Semarang termasuk beriklim tropis dengan dua (2) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun.¹¹⁸ Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi Semarang, suhu udara rata-rata bervariasi dari 69 % sampai 84 %.¹¹⁹ Dari gambaran di atas, jelas bahwa letak geografis kota Semarang adalah sangat strategis.¹²⁰ Kota Semarang juga didukung oleh kondisi musim yang cukup bersahabat, yang menyebabkan kota Semarang sangat potensial sebagai pusat pendidikan, bisnis dan industri.

1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah kota Semarang tercatat 373,70 Km², terdiri atas 36.13 Km² (9.75 %) tanah sawah dan 337.57 Km² (90,25 %) bukan lahan sawah.¹²¹ Menurut penggunaannya, luas sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (55,37 %) yang hanya dapat ditanami selama ada hujan satu tahun sekali dan hanya sekitar 14 %-nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali, karena tersedianya irigasi.¹²² Sedangkan lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dan

¹¹⁸ Loc cit.

¹¹⁹ Loc cit.

¹²⁰ Kota Semarang letaknya tepat pada jantung pulau Jawa, adalah kota yang menghubungkan kota-kota di pulau Jawa, seperti Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta, sehingga sangat strategis dan potensial bagi dunia usaha dan pendidikan.

¹²¹ Loc cit.

¹²² Loc cit.

halaman sekitar, yaitu sebesar 41,47 % dari total lahan bukan sawah. Sedangkan untuk lahan tambak, hanya terdapat di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah pesisir, yaitu di kecamatan Genuk (208.80 ha), Gayamsari (7.15 ha) dan Tugu (1.585.26 ha).¹²³

Sekalipun letak kota Semarang, dibatasi oleh bentangan pantai laut Jawa, namun beberapa wilayah di kota Semarang, mempunyai kategori sebagai daerah dataran tinggi. Dilihat dari ketinggian daerah-daerah yang ada di wilayah kota Semarang yang termasuk daerah dataran rendah dan pesisir, adalah sebagian daerah di kecamatan Tugu, Semarang Utara, Semarang Tengah, Gayamsari dan Genuk. Sedangkan daerah katagori dataran tinggi, meliputi Candi Baru (90,56), Jatingaleh (136.00), Gombel (270.00), Gunungpati (348.00), Ngaliyan (125.00) dan Mijen (253.00).¹²⁴ Khusus pada daerah dataran rendah, permasalahan banjir merupakan permasalahan yang hampir setiap tahun dialami oleh warga kota Semarang, seperti yang dialami oleh warga yang tinggal di daerah Mangkang, Genuk, Semarang Utara dan Semarang Barat. Problem banjir tersebut di samping diakibatkan oleh saluran sungai yang dangkal juga diakibatkan langsung dari proyek pengurukan pantai (reklamasi) pantai.

¹²³Ibid., h. 14

¹²⁴Ibid., h. 3.

Secara administratif kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Banyumanik, Gayamsari, Tembalang, Tugu, Pedurungan, Ngaliyan, Gunungpati, Genuk dan Mijen; yang dari enam belas (16) kecamatan tersebut terdapat 177 kelurahan.¹²⁵ Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57.55 Km² atau 5.399.07 ha yang merupakan 16.63 % dari wilayah kota Semarang, kemudian diikuti kecamatan Gunungpati dengan luas 52.63 Km² (5.399.07 ha) atau 14.45%; sedang kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Gayamsari dengan luas wilayah 5.14 Km² atau 549.47 ha atau 1.47%.¹²⁶ Luas kecamatan dan prosentasenya terhadap luas kota Semarang dapat lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Luas Wilayah dan Prosentasenya
Terhadap Luas kota Semarang (ha)

Kecamatan	Luas Wilayah	Prosentase Terhadap Luas Kota Semarang
Mijen	6.215.25	16.63
Gunungpati	5.339.07	14.45
Banyumanik	763.78	2.16
Gajahmungkur	764.98	2.15
Sem. Selatan	848.05	2.27
Candisari	555.51	1.49
Tembalang	4.420.39	11.83
Pedurungan	2.072.02	5.54
Genuk	2.378.44	7.33

¹²⁵ Ibid., h. 1

¹²⁶ Loc cit.

Gayamsari	549.47	1.47
Sem. Timur	770.25	2.06
Sem. Utara	1.133.28	3.03
Sem. Tengah	604.99	1.62
Sem. Barat	2.386.71	6.39
Tugu	3.129.35	8.37
Ngaliyan	3.269.58	8.75

Diproses dari data BPS Kota Semarang 2001

Dari paparan di atas jelaslah bahwa kota Semarang dengan luas 373,70 Km², yang didukung dengan 16 wilayah kecamatan adalah kota dengan potensi yang beragam, seperti potensi kelautan, potensi pertanian ataupun potensi sebagai kota industri.

1.3 Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah penduduk kota Semarang tercatat sebesar 1.378.193 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2003 sebesar 2,09 %.¹²⁷ Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, memberikan hasil yang nyata.

Sekitar 71,17 % penduduk kota Semarang berumur produktif (15-64) th, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan

¹²⁷Ibid., h. 113

usia tidak produktif (0-14 dan 65 th keatas) pada tahun 2003 sebesar 2,23 yang berarti 1 orang penduduk usia produktif menanggung 2-3 orang penduduk usia tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5 tahun (1999-2003), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah terpadat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah.

1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Dari data yang tercatat, mata pencarian penduduk, berturut-turut adalah petani, meliputi petani sendiri (pemilik sekaligus penggarap), buruh tani dan nelayan (3.30 %), jasa, pedagang, pengusaha dan pegawai (69.38%), buruh industri (17.95 %) serta buruh bangunan (9.37 %).¹²⁸ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹²⁸Ibid., h. 115

Tabel 2
Variasi Mata Pencarian Masyarakat Kota Semarang

Jenis	Prosentase
Petani, buruh tani, pedagang	3,30%
Jasa, pedagang, pengusaha dan pegawai	69,38%
Buruh industri	17,95%
Buruh bangunan	9,37%

Diproses dari data BPS Kota Semarang 2001

1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Dilihat dari ragam keagamaan (baca: agama resmi) masyarakat kota Semarang, mayoritas pemeluk agama Islam (muslim), yakni 83,74% dengan perbandingan 7,17% pemeluk Kristen katolik, 7,008% pemeluk Kristen Protestan, 0,5% pemeluk Hindu, 1,33% pemeluk Budha 0,25% pemeluk lainnya. Untuk lebih kongkritnya dapat dilihat dalam perincian sebagai berikut:

Tabel 3
Data Pemeluk Agama Masyarakat Kota Semarang

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Prosentase
1	Islam	1.154.109	83,74 %
2	Kristen Katolik	98.858	7,17 %
3	Kristen Protestan	96.596	7,008 %
4	Budha	18.330	0,5 %
5	Hindu	6.786	1,33 %
6	Lainnya	3.514	0,25 %

Data diolah dari sumber BPS Kota Semarang dalam Angka, 2003, h. 140

Dari tabel di atas umat Islam (muslim) merupakan mayoritas penduduk kota Semarang.

1.6 Data Keagamaan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana ibadah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Banyaknya Tempat Ibadah Kota Semarang 2003

Kecamatan	Banyaknya				
	Masjid	Mushola	Gereja/Kapel	Vihara/Kuil	Pura
Mijen	48	124	11	0	0
Gunungpati	88	211	3	2	0
Banyumanik	71	124	27	0	0
Gajahmungkur	36	29	10	1	0
Sem Selatan	55	51	23	2	0
Candisari	46	71	16	1	0
Tembalang	88	150	14	0	0
Pedurungan	86	197	8	0	1
Genuk	44	185	4	0	0
Gayamsari	48	45	6	0	0
Sem Timur	32	62	22	0	0
Sem Utara	48	45	6	0	0
Sem Tengah	26	71	20	17	3
Sem Barat	96	87	45	3	0
Tugu	13	73	1	0	0
Ngaliyan	57	139	10	0	0
JUMLAH	882	1.716	246	28	4
2002	855	1.559	242	27	4
2001	845	1.591	236	31	3
2000	837	1.553	235	31	3
1999	826	1.539	236	30	0

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa secara kuantitatif mayoritas penduduk kota Semarang adalah pemeluk agama Islam (83,74%) lihat tabel 3. Dalam konteks pembangunan bidang agama (Islam), terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam pola pembinaan. Indikasi tersebut dapat dilihat, salah satunya pada penambahan pembangunan sarana ibadah, baik Masjid, Langgar ataupun Mushala dari tahun ke tahun (tabel 4). Masjid, Langgar dan Mushala di samping sebagai tempat ibadah masyarakat muslim, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, khususnya bagi anak-anak dalam belajar Al-Quran dan agama.

Dalam konteks perguruan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan agama Islam sangat mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan perguruan agama Islam seperti Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (MADIN) dan lembaga pendidikan agama lainnya dapat berkembang secara baik. Data tentang Perguruan Tinggi Agama Islam di wilayah kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Data Perguruan Agama Islam Kota Semarang

No	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah siswa	Jumlah Guru
1	RA	95	5.118	169
2	MI	87	15.118	606
3	MTS	31	6.079	481
4	MA	13	2.938	266
5	MADIN	50	7.401	544
6	PONPES	43	4.845	409

Data diolah dari sumber Laporan Pergurais Departemen Agama Kota Semarang 2003

Dari data tentang perguruan agama Islam di atas, dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan agama, dapat dikatakan cukup mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat kota Semarang. Lembaga pendidikan agama yang ada di setiap kecamatan adalah RA (Raudhatul Athfal), dengan jumlah masing-masing kecamatan bervariasi, terbanyak di daerah Pedurungan (10), kecamatan Gunungpati (9) dan yang paling sedikit, yaitu (1) satu masing-masing di kecamatan Semarang Selatan, Semarang Tengah dan Gayamsari.¹²⁹ Sedangkan lembaga pendidikan MI (Madarasah Ibtidaiyah), tidak terdapat pada setiap kecamatan. Kecamatan yang tidak ada MI-nya adalah kecamatan Candisari dan Gajahmungkur dan yang terbanyak adalah di kecamatan Gunungpati (12) kemudian

¹²⁹Data diolah dari Sumber Kasi Pergurais (sub RA) kota Semarang tahun 2003.

Tembalang dan Pedurungan, masing-masing 9 buah.¹³⁰ Untuk lembaga pendidikan setingkat SLTP (MTs), tidak terdapat di kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Banyumanik dan Gayamsari, sedang yang terbanyak di kecamatan Tembalang (5), kemudian Gunungpati, Genuk dan Pedurungan, masing-masing empat buah.¹³¹ Lembaga pendidikan Agama MA (Madrasah Aliyah), yang terbanyak adalah di kecamatan Tembalang (3), kecamatan Tugu dan Genuk, masing-masing dua buah.¹³² Sedangkan Madin (Madrasah Diniyah), hampir terdapat pada setiap kecamatan dan terbanyak di kecamatan Genuk (15), dan kecamatan Tugu (9).¹³³ Untuk lebih konkritnya, penyebaran lembaga-lembaga pendidikan agama di kota Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Data Lembaga Pendidikan Agama Per Kecamatan
Kota Semarang

Kecamatan	RA	MI	MTS	MA	MADIN	PONPES
Tugu	6	7	3	2	9	7
Mijen	3	8	2	1	4	3
G.Pati	9	12	4	1	5	8
Sem. Selatan	1	1	1	1	1	-

¹³⁰Data diolah dari kasi Pergurais (sub MI) kota Semarang tahun 2003 wawancara dengan H. Pricle Durry RM, BA (Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Depag Kota Semarang) tanggal 2 Maret 2003.

¹³¹Data diolah dari Kasi Pergurais Kota Semarang tahun 2003.

¹³²Data diolah dari sumber Kasi Pergurais Kota Semarang tahun 2003.

¹³³Data Madrasah Diniyah Kota Semarang 2003.

Sem. Timur	2	5	1	-	-	-
Sem. Tengah	1	1	1	1	-	-
Sem. Utara	5	8	1	-	1	-
Sem. Barat	7	4	2	-	-	-
Genuk	8	9	4	2	17	5
Banyumanik	8	1	-	1	2	-
Candisari	4	-	-	-	1	-
G. Mungkur	2	-	-	-	-	-
Tembalang	12	12	5	3	2	13
Pedurungan	10	12	4	1	6	-
Gayamsari	1	1	-	-	-	-
Ngaliyan	6	7	3	-	5	7
Jumlah	95	83	31	13	53	43

Data diolah dari sumber Laporan Pergurais Departemen Agama Kota Semarang tahun 2003

Dalam rangka menumbuhkan iklim (budaya) agama dalam masyarakat kota Semarang, pemerintah (baca: Departemen Agama) menjalankan program pembangunan dalam sektor agama, dan menitikberatkan pada kebijakan umum, yakni semakin memantapkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; yakni dengan mencanangkan program penyuluhan keagamaan, pembinaan para pengelola tempat ibadah, penataran guru-guru dan pembinaan jama'ah haji. Sedangkan kebijakan untuk memantapkan dan

mendinamisasikan kerukunan umat beragama, telah dilakukan penyelenggaraan silaturahmi antar tokoh agama.¹³⁴

Dilihat dari jumlah jamaah haji yang berangkat tiap tahunnya, kecamatan Pedurungan menduduki tingkat pertama (231 orang) disusul dengan Kecamatan Semarang Barat. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 7

Banyaknya Jamaah Haji Tiap Kecamatan Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah
Mijen	28
Gunungpati	34
Sem Selatan	85
Banyumanik	110
Gajahmungkur	55
Genuk	62
Pedurungan	231
Gayamsari	49
Sem. Timur	52
Candisari	56
Tembalang	81
Sem. Utara	80
Sem. Tengah	51
Sem. Barat	151
Tugu	38
Ngaliyan	130
Jumlah	1.293
2002	1.457
2001	1.457
2000	1.029
1999	1.069

Data Diolah Dari Kantor Depag Kota Semarang 2003

¹³⁴Data diolah dari sumber laporan Pelaksanaan Pemda Tahun 1997/1998, h. 53.

2. Posisi Bank Syariah Dengan Adanya Fatwa Haram MUI

2.1 Alasan dikeluarkannya Fatwa MUI tentang bunga bank haram MUI

Hukum bunga bank haram dan termasuk dalam riba sudah tidak diragukan, karena telah difatwakan oleh majlis ulama sedunia yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1970. Indonesia adalah salah satu anggota Negara OKI. Selama ini keputusan OKI tersebut tidak dikomunikasikan media massa di Indonesia. Sikap MUI mengenai bunga bank juga sudah jelas yaitu bunga bank haram, antara lain terlihat sebagai berikut :

1. MUI telah mendirikan Bank Syariah (Bank Muamalat) sebagai upaya menggantikan bank konvensional yang diyakininya berakhlak riba.
2. Ketua Umum MUI, KH Hasan Basri (alm) dalam sambutan BMI di komplek Dewan Dakwah Indonesia Jakarta tanggal 12-01-1998, memfatwakan "Kalau sudah ada bank syariah, sudah tidak ada lagi darurat (menggunakan bank konvensional) dan bank lain itu haram (sumber dokumen Humas BMI)".
3. Dalam rangka menunjang pelaksanaan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, KH Ali Yafie, Ketua Umum MUI (periode lalu) duduk sebagai Ketua

“Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah” di Bank Indonesia.

4. KH Didin Hafidhuddin, MS, anggota Dewan Syariah MUI, menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan “Sesungguhnya seperti yang telah dikemukakan, bunga bank termasuk kedalam kategori riba yang diharamkan. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Bahkan negara-negara anggota OKI pada sidangnya yang ke-dua bulan Desember 1970 (1390 H) di Karachi-Pakistan telah menyepakati dua hal utama :

- a. bahwa praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.
- b. Bahwa perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kesepakatan itulah yang melatarbelakangi didirikannya IDB (Islamic Development Bank).¹³⁵

Menurut penulis, alasan dikeluarkannya fatwa haram selain karena larangan dan ancaman ajaran agama tentang riba seperti telah ditulis di Bab II, juga karena

¹³⁵ Mimbar Ulama No. 309 Rabiul Awal 1425 H/Mei 2004

berdampak negatif. Menurut **Mustaq Ahmad**¹³⁶, dampak negatif riba yaitu :

1. Menyebabkan permusuhan antar individu dan menghapus sifat tolong menolong sesama manusia. Sedangkan semua agama terutama Islam mendorong agar manusia saling tolong menolong.
2. Riba dapat meningkatkan rasa tamak yang berlebihan, mementingkan diri sendiri, keras hati, tirani dan memuja uang.
3. Riba mengakibatkan terjadinya penimbunan akumulasi kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika diinvestasikan, hanya dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Riba menghambat sirkulasi kekayaan. Karena kekayaan itu hanya akan berada di tangan pemilik modal.
5. Pendapatan riba merupakan bentuk perolehan harta tanpa usaha yang menzalimi orang lain, padahal Islam

¹³⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka kaustar, 2001, hal 133-134. Lihat juga Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah Catatan Dakwah Seorang Praktisi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), hal 76, Abu Ahmadi Anshori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya, : Bina Ilmu, 1980) hal 86

menganjurkan umatnya untuk berusaha dalam mencari rizki.

2.2 Tanggapan Masyarakat

Tanggapan Masyarakat dengan adanya Fatwa Haram sangat bervariasi. Menurut Idrus¹³⁷, terdapat tiga kelompok masyarakat dalam menghadapi fatwa tersebut:

1. Mereka yang sudah siap dan sangat apresiatif.
2. Kelompok yang belum siap dan separuh hati
3. Komunitas yang menolak dan sengaja menghindar serta tidak mau tahu dengan dengan keputusan tersebut.

Menurut penulis, sikap yang pertama ini adalah sikap mukmin yang sejati, tegar dan selalu siap untuk menjalankan syariat Islam walau kadang kontraproduktif dengan hal-hal yang dicintainya. Sikap yang kedua dapat dipahami, karena ada dua hal yang paling sulit di dunia yaitu meninggalkan kebiasaan dan membiasakan yang belum pernah dikerjakan. Jadi butuh waktu untuk sikap kedua untuk berpindah dari kebiasaanya. Sikap ketiga yakni yang menolak dan sengaja menghindar dikarenakan perhitungan *nonreligi*, misalnya pertimbangan untung rugi ataupun juga karena ketidaktahuan mereka tentang bahayanya riba.

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, memiliki kedinamisan di bidang perdagangan dan industri menjadi kota

¹³⁷ Idrus, *Mengkaji Hukum Bunga Bank*, dalam Mimbar Ulama No. 305/XXV Dzulkaidah 1424 H/Januari 2004, (Jakarta : CV Manuntung, 2004), hal 22-23

tujuan urbanisasi. Sehingga komunitas penduduk Semarang terdiri dari berbagai macam status sosial, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman agama. Secara umum masyarakat Semarang belum memiliki pemahaman yang baik dengan sistem perbankan syariah dan tentang pengharaman bunga bank, padahal Allah SWT melaknat orang-orang yang bermuamalat dengan riba. Berdasarkan penelitian BI¹³⁸ tentang persepsi masyarakat terhadap bunga bank di Jawa Tengah dan DIY sangat bervariasi. Secara umum dapat dilihat sebagian besar atau 48,27 persen menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Sedangkan yang menyatakan halal sebesar 20,47 persen. Sementara mereka yang menyatakan bahwa bunga bank adalah subhat adalah 31,47 persen. Beberapa pendapat warga Semarang sebagai dengan tingkat pemahaman bank syariah dan haramnya riba yang bermacam-macam sebagai berikut :

1. Nasabah Andi yang memiliki kesalahan dan tingkat pendidikan tinggi masih beranggapan bahwa sebenarnya bank syariah sama halnya dengan bank konvensional dalam hal mencari keuntungan. Nasabah Andi¹³⁹ berpikir bahwa bank syariah tidak mengambil keuntungan, padahal konsep dasar sebuah bank adalah sebagai badan usaha yang tidak

¹³⁸ Penelitian BI, "Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta", 2000

¹³⁹ Nasabah Andi tinggal di Jl. Bulustalan adalah seorang tenaga pengajar di PTS, wawancara 25 november 2004

lepas dari mencari “profit”. Sehingga alasan untuk menabung hanyalah karena mencari “aman” dari riba.

2. Nasabah Budi¹⁴⁰ mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan pemahaman agama yang bagus, tidak berpikir seperti nasabah Andi. Menurutnya apabila telah jelas dalam Al Quran tentang pelarangan riba maka tidak perlu ada keraguan.
3. Novita¹⁴¹ menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya berganti istilah-istilah pada operasionalnya, disamping itu masih memandang bahwa bunga bank tidak haram karena menganggap masih ada kontroversi pada tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Mayoritas warga Semarang berpendapat sama dengan Novita
4. Helda¹⁴² berpendapat bahwa bunga bank itu haram, namun karena jaringannya yang belum sampai di daerah asalnya, menyebabkan dia belum menjadi nasabah bank syariah.
5. Yusti¹⁴³ berpendapat bahwa mayoritas alasan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah tidak karena adanya fatwa haram MUI, tapi lebih pada keyakinan dan kemauan

¹⁴⁰ Nasabah Budi tinggal di Bukit Sukorejo Sekaran, seorang Hakim di Pengadilan Agama. Wawancara 9 Februari 2005

¹⁴¹ Novita, wawancara pribadi 27 November 2004, alumni PTN Semarang

¹⁴² Helda, mahasiswa Pasca sarjana PTN di Semarang berasal dari Palembang, tinggal di Pleburan, wawancara 9 Januari 2005

¹⁴³ Yusti, Customer service BRI Syariah Semarang

dari individu untuk melaksanakan ajaran agama secara *kaffah* (sempurna).

6. Rahadi¹⁴⁴ menjelaskan bahwa mayoritas nasabah BRI Syariah adalah kalangan nasabah rasional artinya nasabah yang lebih mementingkan perhitungan untung rugi dalam menyimpan maupun meminjam dana, bukan nasabah emosional yaitu nasabah yang berhubungan dengan bank syariah karena pertimbangan emosi keagamaan semata. Sehingga ada nasabah nonmuslim yang melakukan pembiayaan dikarenakan produk pembiayaan bank syariah lebih menarik dibandingkan bank konvensional. Kontribusi aset nasional bank syariah masih kecil sekali yaitu 1%, karena salah satu faktornya karena masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya produk-produk bank syariah lebih menarik (keuntungannya lebih besar) dari bank konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi nasabah bank syariah. Menurut penulis, dengan adanya fatwa haram MUI tidak berpengaruh pada keinginan masyarakat Semarang untuk menjadi nasabah bank syariah. Hal ini dikarenakan walaupun jumlah warga Semarang muslim mayoritas namun tingkat

¹⁴⁴ Rahadi, Legal & HRD Officer BRI Syariah Semarang

pemahaman agama (tentang riba) sangat variatif dan kemauan untuk melaksanakan ajaran agama secara *kaffah* (sempurna) juga tidak maksimal sama seperti pelaksanaan ibadah *mahdoh* (bersifat ketuhanan) seperti solat, puasa, zakat yang bersifat wajib bagi tiap muslim.

Faktor pertimbangan untung rugi juga menjadi pilihan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga perbankan. Berdasarkan penelitian BI¹⁴⁵, kota Semarang merupakan daerah yang respon masyarakatnya terhadap nilai untung rugi bila memanfaatkan bank syariah menduduki proporsi terbesar dibanding kota lain di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan teori *exchange* oleh **George Homas**¹⁴⁶. Teori ini berusaha memahami perilaku manusia sebagai sesuatu yang selalu disadari oleh konsideran untung rugi yang akan diperoleh jika pilihan tidak ditempuh.

Menurut Homas suatu perilaku tergolong rasional apabila keuntungan yang dapat diraih lebih besar dari kerugian yang akan menyimpannya. Jadi dengan meminjam logika teori ini sikap yang cenderung memanfaatkan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah, salah satu alasan yang

¹⁴⁵ Penelitian BI, "Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta", 2000

¹⁴⁶ Penjelasan lengkap dalam Irving M. Zeithing, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansori & Juhanda, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1986), hal 93-100. Bandingkan dengan Paloma M., *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal 51-76, serta George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma anda*, (Jakarta, Rajawali Press, 1992)

mendasarinya adalah didahului oleh perhitungan untung rugi sebelum memilih suatu pilihan terhadap bank mana yang akan dipakai sebagai tempat berinvestasi.

Keadaan yang demikian berdampak pada keengganan masyarakat untuk menabung uangnya pada bank syariah. Hal lain yang ikut berpengaruh adalah disebabkan oleh adanya sosialisasi yang sangat kurang dan jarang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pengelola perbankan itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan serta apa dan bagaimana bank syariah.

Kelambanan para pengelola perbankan syariah ini mengakibatkan respon masyarakat akan bank syariah lamban pula seharusnya mereka dapat secara proaktif untuk mensosialisasikannya, sehingga masyarakat betul memahami dan mengetahui bank syariah yang sesungguhnya. Sebagaimana disampaikan oleh Max Weber dalam teori aksinya yang menyatakan bahwa teori aksi mendasarkan pada suatu ide dasar, yaitu :

1. manusia adalah merupakan aktor yang aktif dan kreatif dari realitas sosial:
2. realitas sosial bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial, artinya tindakan manusia tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh

Supaya dapat memahami tindakan-tindakan manusia menurut Weber haruslah melihat apa yang disebutnya sebagai tindakan sosial, yaitu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna subyektif bagi dirinya, dan diarahkan pada tindakan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan metode *verstehen* atau melalui penafsiran dan pemahaman dengan tujuan agar dapat memahami motif dari tindakan masing-masing aktor.¹⁵⁰

Weber percaya bahwa sangat kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat, dapat dimengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan antar pribadi, dari para anggota masyarakat itu.¹⁵¹

Agar memahami secara jelas, Weber mengemukakan empat jenis konsep tipe ideal tindakan manusia, yang merupakan cara-cara individu memberi makna pada tindakan mereka, yaitu tingkah laku rasional tujuan; tingkah laku rasional nilai; tingkah laku emosional dan tingkah laku tradisional. Selanjutnya Weber mengemukakan, manusia sampai taraf tertentu harus memilih nilai-nilainya dan menentukan sendiri bagaimana tindakan-tindakannya menjadi rasional, emosional atau tradisional. Akan tetapi sejauh mana

¹⁵⁰ George Ritzer, opcit hal 44 & 46

¹⁵¹ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian Perbandingan*, Penerjemah : F, Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal 199

pilihan itu dapat dilakukan, tetap dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial individu, karena manusia mempunyai kecenderungan untuk membuat pilihan-pilihan nilai¹⁵² atas dasar struktur otoritas masyarakat tempat individu itu tinggal, oleh karena itu untuk melengkapi analisisnya Weber mengemukakan konsep yang kedua yaitu hubungan sosial, yang diartikan sebagai tindakan beberapa orang aktor yang berbeda-beda akan tetapi memperlihatkan adanya saling penyesuaian, sejauh tindakan itu mengandung makna dan dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Hubungan sosial ini oleh Weber dibedakan dalam bentuk yaitu konflik, komunitas dan kerja sama. Berdasarkan pendapat Max Weber dan Talcot Parson diatas dapatlah diketahui bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses, dimana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subjek tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilihnya, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan, dalam bentuk norma-norma, nilai-nilai sosial. Didalam menghadapi situasi yang bersifat kendala baginya itu, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya berupa kemampuan bebas.

¹⁵² Pemilihan nilai ini oleh umat Islam dipandang sebagai nilai filosofis yang merupakan suatu keyakinan atas kebenaran ajaran Islam sebagai *Dimul Haq*, dan sebagai suatu system yang sempurna (*kamil*)

2.3 Posisi Bank Syariah Dengan Adanya Fatwa Haram MUI

Dampak dari pasca fatwa haram MUI ditunjukkan dengan tanda meningkatnya dana perbankan syariah secara nasional sehingga menyebabkan perbankan syariah mengalami kelebihan dana masyarakat. Menurut **Burhanuddin Abdullah**¹⁵³, total asset perbankan syariah telah mencapai Rp. 5,73 triliun dan pembiayaan sebesar Rp. 5,53 triliun. Adapun porsi masing-masing terhadap perbankan secara nasional adalah sebesar 0,69 persen (total asset), 0,66 persen (investasi dana masyarakat) dan 1,19 persen (pembiayaan). Hal ini menurutnya menyebabkan meningkatnya dana yang ditanamkan dalam Sertifikat Wadiah Bank Indonesia karena kurangnya pembiayaan dan investasi yang dilakukan bank syariah dan akan berdampak pada kurangnya pendapatan bank syariah, yang juga berakibat pada turunnya bagi hasil deposito dan tabungan.¹⁵⁴ Bila hal ini dibiarkan terus menerus maka nasabah akan berpikir dua kali untuk menabung di bank syariah karena bagi hasil yang turun. Hal ini hendaknya diperhatikan para praktisi perbankan syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di kota Semarang, ditemukan bahwa adanya fatwa haram bunga bank oleh MUI tidak memberikan perubahan signifikan dalam

¹⁵³ Gubernur BI dari data sampai akhir desember 2003

¹⁵⁴ Modal Edisi April 2004, hal 26

penambahan dana bank syariah,¹⁵⁵ hal ini dikarenakan tingkat pemahaman agama masyarakat Semarang sangat variatif, dan tergantung dari kemantapan dan semangat (*ghiroh*) keagamaan tiap individu bukan dari indikator adanya fatwa haram MUI.¹⁵⁶ Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang tidak mengalami penambahan dana signifikan dengan adanya fatwa haram MUI, yang mengalami penambahan Bank Syariah Mandiri di Kalimantan dan Sumatra. BRI Syariah Cabang Semarang juga tidak mengalami penambahan dana yang signifikan, untuk BRI Syariah yang mengalami penambahan untuk Jawa Tengah adalah BRI Syariah Solo. Bank Muamalat mengalami penambahan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada bulan Februari 2004 mengalami penurunan. Menurut Aini¹⁵⁷, naiknya dana pada akhir tahun yang bertepatan dengan adanya fatwa haram MUI terjadi karena dua kemungkinan. Pertama karena bertepatan dengan fatwa haram MUI, kedua merupakan salah satu program tahunan dari bank untuk melampaui target dana pihak ketiga. Lebih jelasnya terdapat pada tabel dibawah :

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ucok Mulyadi (Manager Operasi BSM Cabang Semarang) 13 Oktober 2004, Yusti (Customer Services BRI Syariah Cabang Semarang) 28 Januari 2005, Chusnul (Teller BNI Syariah Cabang Semarang), 2 Desember 2004, Rahadi Kristiyanto (Legal Officer BRI Syariah Semarang) 23 Februari 2005

¹⁵⁶ Yusti, Customer Service BRI Syariah Cabang Semarang.

¹⁵⁷ Aini, Sekretaris Bank Muamalat cabang Semarang, wawancara Pribadi tanggal 4 Maret 2005

Tabel 8

Indikator Bank Muamalat Cabang Semarang (dalam miliar Rp)

Indikator	Oktober 2003	November 2003	Desember 2003	Januari 2004	Februari 2004
Dana pihak ketiga	50.807	50.761	50.402	52.155	52.122
Pembiayaan yang diberikan	95.350	95.282	94.905	94.171	93.119

Sumber : Data Bank Muamalat 2005

Dari tabel diatas terdapat penambahan dana signifikan pada Desember 2003 ke Januari 2004 sebesar Rp. 1.753 M, namun tidak terjadi di bulan Februari.

Secara nasional terjadi penambahan dana pada bank syariah, namun tidak terjadi pada bank syariah di Semarang. Hal ini karena masyarakat Semarang lebih banyak tergolong pada nasabah rasional daripada nasabah emosional, yang lebih memperhitungkan pada pertimbangan untung rugi daripada bahayanya riba baik dari sisi duniawi maupun *ukhrowi* (pertanggungjawaban kepada Allah SWT). Keuntungan yang didapat nasabah bank syariah tidak kalah menarik dibanding bank konvensional, namun karena masyarakat tidak tahu dan telah terbiasa dengan bank konvensional dalam kehidupan sehari-hari maka masyarakat merasa asing. Ketidaktahuan masyarakat tentang bank syariah merupakan kendala sosialisasi dari bank syariah.

Sikap Bank Indonesia, dalam hal ini Gubernur BI¹⁵⁸ kaitannya dengan adanya fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan MUI yaitu :

- a. Bank Indonesia menghargai dan menghormati fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai bunga bank. Fatwa tersebut diharapkan dapat memacu perbankan syariah untuk meningkatkan *service of excellence* dan profesionalisme yang lebih baik. Fatwa MUI merupakan pesan moral bagi umat, maka keputusan akhirpun diserahkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.
- b. BI tetap mengembangkan *dual banking system* yaitu adanya dua sistem operasional bank yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah sebagaimana telah diamanatkan oleh UU. Pengembangan dari sistem perbankan syariah tersebut merupakan respon dari kebutuhan sebagian masyarakat akan adanya perbankan yang dalam operasionalnya tidak berdasarkan bunga.
- c. Tidak terdapat urgensi untuk mengkhawatirkan adanya pengalihan dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah. Fatwa tersebut hendaknya disikapi secara bijaksana oleh masyarakat, praktisi perbankan syariah

¹⁵⁸ Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah dalam Seminar Akhir Tahun bertema "Refleksi dan Arah Pengembangan Industri Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2004", Jakarta

maupun bank konvensional. Bagi bank syariah, adanya fatwa tersebut harus memacu bank tersebut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dan profesionalisme yang lebih baik.

Posisi bank syariah dalam perbankan nasional dengan adanya fatwa haram MUI tetap sebagai lembaga *intermediasi* yang berperan pada pembangunan ekonomi.

3. Faktor Pendukung Dalam Operasional Bank Syariah

Faktor Pendukung dalam operasional bank syariah¹⁵⁹ :

- a. besarnya jumlah umat Islam Indonesia.

Jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 80% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia bahkan terbesar di dunia. Pada dasarnya jumlah penduduk muslim adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang semestinya harus dimanfaatkan secara baik¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Data didapat dan diolah oleh penulis dari :

- a. Yuslam Fauzi "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah" makalah dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia (SEMNAS KoKaSEI) 11-13 Mei 2000 di FE UNDIP
- b. Arif Pujiyono, "Posisi dan Prospek Bank Syariah Dalam Dunia Usaha Perbankan", makalah disampaikan pada diskusi Bedah Bisnis Bank Syariah, tanggal 4 Mei 2004 HMPS Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang).
- c. Rahadi Kristiyanto, Legal & HRD Officer BRI Syariah Semarang, wawancara 23 Februari 2005

¹⁶⁰ Yuslam Fauzi "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah" dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia (SEMNAS KoKaSEI) 11-13 Mei 2000 di FE UNDIP, Aini, Sekretaris BMI Cabang Semarang Wawancara Pribadi tanggal 4 Maret 2005

- b. pemerintah mengundang beberapa dasar hukum pendukung perkembangan bank syariah yaitu penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan nasional mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung bagi pengembangan bank syariah yaitu dengan SK Direksi Bank Indonesia berkenaan dengan ketentuan teknis dan operasional dalam perbankan syariah, termasuk sistem akuntansi melalui PSAK No. 59 dan PAPS I tahun 2003.
- c. Perbankan syariah menekankan prinsip keadilan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Pengalokasian sumber dana melalui mekanisme penentuan rasio bagi hasil antara penabung bank dan pengusaha akan lebih rasional dan efisien dibanding sistem bunga. Mekanisme bagi hasil menjadikan distribusi lebih merata dan adil karena adanya aspek yang berkaitan dengan bagi resiko, artinya masing-masing pihak menanggung resiko. Pemilik modal dapat mendistribusikan resiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dengan bank. Sementara pemilik tenaga atau keahlian tidak dapat membagikan tenaga atau keahliannya dengan pemilik modal. Masing-masing pihak akan berpartisipasi dalam resiko kerugian modalnya sedangkan pihak pelaksana proyek mengalami kerugian tenaga atau biaya

tenaga kerja dan waktu yang dikeluarkan. Hal inilah yang menunjukkan operasionalisasi bank syariah senantiasa mengedepankan unsur keadilan dalam distribusi pendapatan, sehingga sistem bagi hasil tidak hanya mendatangkan berkah tapi juga tetap membuka peluang bisnis dalam ketidakpastian ekonomi. Pada saat tingkat bunga sangat tinggi banyak bank konvensional terkena *negatif spread*. Pada sisi lain, perbankan syariah masih tetap beroperasi dengan tingkat keuntungan normal sesuai dengan sektor riil.

- d. Sistem bank syariah lebih memungkinkan keberagaman produk dalam operasional dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan struktur masyarakat yang religius muslim mayoritas, budaya kebersamaan dan gotong royong, kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta banyaknya industri kecil dan menengah (UKM), semakin membuka lebar peluang bank syariah di Indonesia. Sektor agraris dan UKM ini, meskipun banyak diabaikan ternyata pada saat krisis ekonomi menimpa perekonomian Indonesia keduanya masih mampu bertahan. Sektor agraris merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat yang berpenduduk 220 juta jiwa ini. Perbankan syariah memiliki peluang luas dengan produknya yang menjangkau sektor agraris seperti *salam* dan *istina*. Daya tahan UKM dan kemampuannya sebagai sumber devisa alternatif

yang besar menunjukkan aktifitas perekonomian riil masih berjalan sesuai dengan kenyataan potensi yang ada.

- e. Dalam mekanisme pemasaran bank syariah memberikan peluang ke depan yang cukup potensial karena sesuai dengan *market driven*¹⁶¹. Penelitian Bank Indonesia tahun 2000 tentang persepsi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap produk dan jasa syariah di Indonesia menunjukkan peluang yang cukup besar. Hasil kesimpulan penelitian tersebut di enam propinsi dengan rata-rata persentase muslim 97 % menunjukkan bahwa rata-rata 42% masyarakat memiliki persepsi bahwa bunga bertentangan dengan aturan agama, meskipun yang memahami produk dan mamfaat perbankan syariah rata-rata hanya 11%. Kesimpulan penting atas penelitian BI tersebut adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang merindukan sistem bank yang sesuai dengan syariah. Artinya pengembangan bank syariah berdasarkan *emotional benefit* masih cukup tinggi untuk pengembangan jaringan *networking*.

¹⁶¹ Pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil mempunyai keunggulan sebagai berikut¹⁶² :

1. lebih menunjukkan bisnis dan keadilan karena pengusaha hanya akan membayar bagi hasil sesuai keuntungan riil yang diperoleh.
2. adanya fleksibilitas dan dinamika yang tidak akan menyebabkan kebangkrutan dan hilangnya produktifitas masyarakat.
3. memberikan peluang kemitraan usaha karena setiap penyaluran dana bank dikaitkan dengan sektor riil disertai pembinaan dan pengawasan dalam proses manajemen perusahaan.
4. memberikan kesempatan berkembang usaha kecil karena dasar penilaian pembiayaan adalah kelayakan usaha nasabah bukan pada sisi jaminan.
5. dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka *cost push inflation* dapat ditekan/dihapus.
6. tidak mengenal "*negative spread*" seperti dialami oleh bank konvensional, akibat kenaikan suku bunga simpanan.
7. bank syariah tidak boleh melakukan usaha spekulatif yang membahayakan bank.

¹⁶² Rudjito, Makalah "*Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Praktis*", disampaikan pada Seminar Perbankan Syariah Dalam Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan, diselenggarakan oleh Business Reform & Reconstruction (BRRC), Jurnal Hukum Bisnis, Law Offices Of REMY & DARUS bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia di Ruang Serbaguna Gedung B lantai 3, bank Indonesia, 18 Juli 2002.

4. Faktor Penghambat Dalam Operasional Bank Syariah

Dalam melakukan operasionalnya, bank syariah menemui kendala-kendala. Menurut **Mohamad Hidayat**¹⁶³ terdapat kendala pengembangan dan operasional sistem ekonomi Islam (Lembaga Bisnis Islam) di Indonesia :

1. *political will* pemerintah masih kurang dalam hal ini, dapat dilihat dari berbagai regulasi (peraturan) yang dibutuhkan oleh bank syariah belum sepenuhnya diakomodir. Disamping itu dukungan modal pemerintah sangat kecil kalau disbanding bank konvensional.
2. SDM yang masih langka dengan manajemen yang kurang profesional, sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan pada masyarakat.
3. belum konsennya ulama untuk memberikan keteladanan dalam menggunakan bank syariah dan peran ulama dalam sosialisasi bank syariahpun masih kurang.
4. kurang komitmen umat untuk memanfaatkan jasa-jasa dan produk bank syariah
5. masih kurangnya pengembangan kantor dan produk serta jasa bank syariah, sehingga masyarakat belum banyak memanfaatkannya.

¹⁶³ Mohamad Hidayat (Anggota Dewan Syariah Nasional MUI), Makalah *Peran Ulama Dalam Pengembangan & Sosialisasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KSEI SeIndonesia, Undip Semarang, 11-13 Mei 2000

Dalam kaitannya dengan hal ini, Syamsul Falah¹⁶⁴ menyatakan ada beberapa kendala yang dihadapi Bank Syariah di Indonesia, sehingga perbankan syariah belum dapat berperan secara optimal dalam dunia keuangan dan masyarakat. Kendala itu ada yang sifatnya eksternal dan internal, diantaranya sebagai berikut :

a. Hukum

Sebelum tahun 1998 perbankan syariah berjalan tanpa adanya sandaran hukum yang kokoh dan peraturan operasional perbankan yang sesuai dengan syariah serta perangkat lainnya. Keadaan ini menyebabkan perbankan syariah berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Akibatnya ciri khusus produk Islami ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

b. Likuiditas

BI belum menyediakan fasilitas likuiditas tanpa bunga bagi bank syariah, hal ini karena BI menjalankan UU bank sentral No. 13 tahun 1968 yang menyatakan bahwa pendapatan BI adalah bunga.

c. *Earning Assets*

Standar yang digunakan oleh BI untuk mengukur kolektibilitas antar bank syariah dan konvensional adalah sama, padahal

¹⁶⁴ Syamsul Falah, Makalah "Perbankan Syariah Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia", Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Nasional, 2000, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Mei, 2000, hal 3-5

dalam perbankan syariah dimungkinkan dengan pendapatan nol. Contohnya jika usaha yang dibiayai oleh bank syariah secara mudharabah pengembaliannya nol, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan. Bagi bank syariah fenomena ini sesuatu yang normal sehingga "*nature of business cycle*" yang mengakibatkan penurunan pendapatan, sementara bank sentral akan mengukurnya dengan ukuran pembiayaan pada bank konvensional, dan memasukkannya ke dalam kolektibilitas.

d. Perpajakan

Perbankan syariah memiliki produk *ba'i* (jual beli) dalam hal ini perbankan syariah menjalani kendala perpajakan. Produk *ba'i* seharusnya diperlakukan sebagai jual beli riil, bukan pembiayaan, sehingga akan terjadi pajak ganda (*double taxation*), yaitu pajak jual beli ketika transaksi dari pajak pendapatan pada akhir tahun.

e. Standar Fatwa

Belum adanya keberagaman fatwa tentang beberapa produk perbankan syariah, walaupun ada Dewan Syariah Nasional (DSN) tetapi setiap DSP di setiap institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda dengan yang lain. Hal semacam ini akan membingungkan umat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

f. Jaringan Bank Syariah

Jaringan bank syariah masih sangat terbatas, keterbatasan jaringan ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan bank syariah terhadap masyarakat yang mendambakan produk bank syariah.

g. Sumber Daya Insani

Masih sangat terbatas sumber daya insani yang memiliki pengetahuan prinsip maupun ketrampilan teknis, sehingga akan berpengaruh pada kualitas pelayanan perbankan syariah.

h. Persepsi Masyarakat

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman terbatas mengenai kegiatan operasional perbankan syariah. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian masyarakat memiliki persepsi yang tidak tepat mengenai operasional perbankan syariah.

Rudjito¹⁶⁵ menyatakan bahwa dalam operasional bank syariah terdapat permasalahan-permasalahan serta upaya mengatasinya, antara lain :

- a. pemahaman masyarakat pada umumnya tentang bank syariah masih sangat rendah sehingga daya serap masyarakat untuk memanfaatkan produknya masih kecil. Sehubungan dengan itu perlu diadakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan masyarakat

¹⁶⁵ Rudjito, "Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Praktis", Jurnal Hukum Bisnis Volume 20, (Jakarta : Agustus September 2002), hal 38

guna meningkatkan pemahaman Bank Syariah tersebut. Untuk kegiatan tersebut diperlukan daya dan dana yang tidak sedikit karena merupakan investasi jangka panjang.

- b. Adanya perbedaan pandangan tentang bunga bank haram dan *subhat*. Fatwa dari beberapa organisasi massa Islam yang berpengaruh di Indonesia memutuskan bahwa riba adalah haram. Namun mengenai bunga yang diberikan oleh Bank milik Negara kepada nasabahnya atau sebaliknya masih terdapat perbedaan yaitu ada yang mengatakan haram ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan *subhat/mutashabihat*. (dianggap meragukan). Guna mengatasi permasalahan tersebut dengan memprioritaskan target utama pemasaran bank syariah kepada *emotional market* (yang mengharamkan bunga bank).
- c. Adanya beberapa produk bank syariah yang ketentuan/hukum positifnya bukan untuk bank syariah. Contohnya produk *rahn* (gadai), hukum positif yang ada hanya mengatur ketentuan gadai yang digunakan oleh perusahaan pegadaian. Bank syariah mempunyai produk *ijarah (leasing)*, namun ketentuan hukum positif yang ada hanya mengatur perusahaan *leasing* saja.
- d. Kenyataan yang ada masih banyak ketidaksamaan penerapan prinsip syariah dan aturan perbankan itu sendiri. Sebagai

contoh masalah kolektibilitas pinjaman atau pembiayaan untuk bank syariah. Seorang petani menerima pembiayaan dari bank syariah untuk modal kerjanya sebesar Rp. 15 juta. Pembiayaan direalisasi dengan pembayaran dilakukan 6 bulan kemudian, atau saat panen. Menurut ketentuan BI tentang kolektibilitas karena selama 6 bulan tidak ada cicilan, maka kolektibilitas pembiayaan tersebut rendah.

- e. Bank syariah “dilahirkan” pada era tingkat persaingan Bank yang sangat kuat dengan beberapa keunggulan, antara lain *online banking sistem*: sentralisasi sistem operasional, *phone banking*, ATM, Kartu kredit, kartu debit, dan lain-lainnya. Apabila bank syariah beroperasi dengan sistem seadanya akan sulit dalam menghadapi persaingan. Dewasa ini dunia usaha tidak lepas dari perkembangan teknologi, karena itu produk, sistem operasional, pelayanan dan sistem teknologi yang diterapkan pada Bank Syariah seyogyanya tidak ketinggalan dengan bank lain.
- f. Pengelola bank syariah pada umumnya *ex-pekerja* bank konvensional yang umumnya sudah terbiasa dengan operasional perbankan konvensional, sehingga biasanya sangat sulit merubah paradigma berpikir ke bank syariah. Perubahan paradigma ini perlu dilakukan melalui proses pendidikan, seminar atau sosialisasi secara simultan.

g. Persyaratan modal minimal untuk pendirian bank syariah baru sama dengan keperluan modal pendirian bank konvensional yaitu minimal Rp. 3 triliun, tentu saja merupakan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi. Tampaknya Bank Indonesia membuat jalan keluar, yakni dengan Kebijakan Bank Indonesia yang mengatur dengan alternatif antara lain :

- Pembukaan kantor cabang syariah baru dari bank umum konvensional.
- Konversi kantor cabang bank umum konvensional menjadi kantor cabang syariah
- Peningkatan status kantor cabang pembantu bank umum konvensional menjadi kantor cabang bank syariah.

Besarnya modal kerja yang diperlukan untuk pembukaan kantor cabang syariah bagi bank umum konvensional sekurang-kurangnya :

- a. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk setiap kantor yang berkedudukan di wilayah Jabotabek.
- b. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap kantor cabang syariah yang berkedudukan di luar wilayah Jabotabek.

B. PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM, PROSPEK PASAR DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

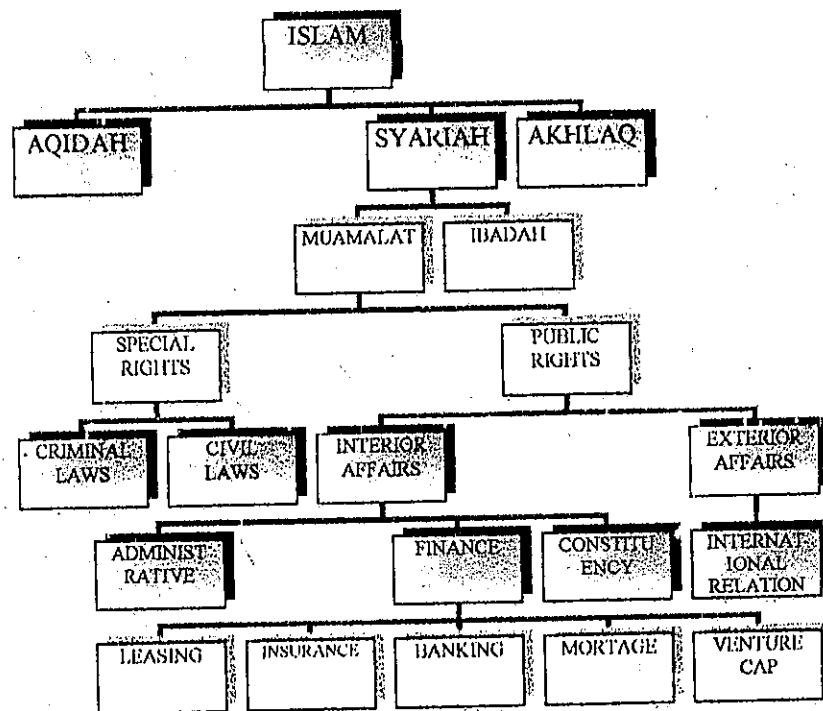
1. Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Dalam ekonomi

Islam

Kegiatan perbankan sebagai salah satu institusi perekonomian Islam, sebagaimana halnya seluruh aspek kehidupan manusia mengacu dan berlandaskan syariat Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya perbankan tidak dapat dilepaskan dan tercerabut dari nilai-nilai ajaran Islam. Ajaran Islam terdiri dari tiga komponen, yaitu : Aqidah, Syariah dan Akhlaq. Aqidah sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Syariah senantiasa diubah menurut kebutuhan dan taraf peradaban umat di mana seorang Rosul diutus. Asas penetapan syariah Islam adalah menghilangkan keberatan dan tidak menyulitkan, menciptakan kemaslahatan dan menciptakan keadilan.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rosul terakhir memiliki sifat yang *comprehensive* dan *universal*. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan manusia baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal artinya dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut :

Bagan 1-Islam A Comprehensive Way of Life¹⁶⁶



Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa lembaga perbankan adalah salah satu institusi ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Institusi lainnya yang juga mulai berkembang yaitu : asuransi takaful, *leasing* (*ijarah*), pegadaian syariah (*rahn*), reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah. Sistem ekonomi Islam menurut **Amin Aziz**¹⁶⁷ adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dipengaruhi/dilandasi oleh syariah Islam.

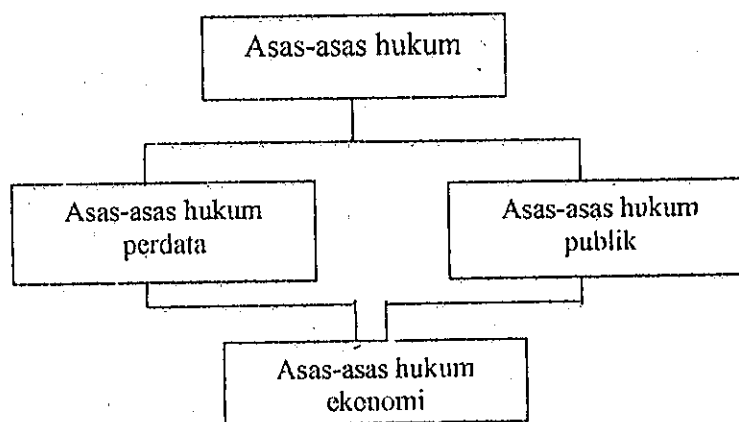
¹⁶⁶ Syafii Antonio dalam Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar maju, 2002), hal 98

¹⁶⁷ Amin Aziz, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, (Jakarta, PINBUK, 1996), hal 2

Hukum perbankan, demikian juga hukum perbankan syariah merupakan salah satu kajian hukum ekonomi. Hal ini disebabkan hukum perbankan meliputi dua aspek, yaitu aspek-aspek Hukum Publik dan aspek-aspek Hukum Privat. Untuk lebih jelasnya Sri Redjeki memberikan gambaran mengenai proyeksi asas-asas hukum ditinjau dari kajian hukum ekonomi dalam bagan berikut.¹⁶⁸

Bagan 2

Asas-Asas Hukum Ditinjau Dari Kajian Hukum Ekonomi



Asas hukum publik diimplementasikan dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kelembagaan bank syariah seperti izin pendirian, jenis usaha, pengawasan, perpajakan dan perlindungan konsumen, sedangkan asas-asas hukum perdata diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian antara bank syariah dengan

¹⁶⁸ Sri Redjeki Hartono, "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi", Pidato Pengukuhan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Di Dalam Hukum Dagang, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 18 Desember 1995, hal 16

nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana.

Perbankan syariah belum diatur dalam Undang-undang tersendiri, karena masih menginduk dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Perkembangan hukum perbankan syariah merupakan dasar hukum bagi tumbuh kembangnya bank syariah di Indonesia. Menurut penulis perkembangan bank syariah dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode:

1.1 Periode tahun 1992-1998

Istilah penamaan

Operasional bank syariah masih berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU tersebut sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah atau bank Islam dan perbankan syariah atau perbankan Islam. Penyebutannya masih disamarkan dengan menggunakan istilah "prinsip bagi hasil". Pembuat Undang-undang waktu itu memang secara sengaja menghindarkan penyebutan syariah atau Islam secara tegas dalam Undang-undang itu, karena pertimbangan situasi politik yang tidak memungkinkan.

Dalam UU No. 7 tahun 1992 disebutkan dalam Pasal 13 huruf c bahwa :

"bank dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah."

Sebagai tindak lanjutnya oleh pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 disebutkan yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan. Syariat disini, ditafsirkan sebagai syariat yang berdasarkan pada hukum Islam atau singkatnya syariat Islam. Atas dasar ini lahirnya bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan syariat Islam atau bank Islam.

Tampaknya pembuat undang-undang saat itu lebih memilih terminologi yang netral yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Jika dilihat dari latar belakangnya, hal ini beralasan karena memang situasi pada era awal

sembilan puluhan secara politis kurang memungkinkan digunakannya kata-kata Islam secara formal. Secara sosiologi, realitas orde baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin ditekankan berupa nilai-nilai (*value*), bukan organisasi. Nilai-nilai lebih itu lebih berada pada tingkat teologis dan filosofis dari pada hukum (*fiqh*) yang lebih sosiologis. Karena itulah, lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam daripada Islam dalam wujudnya yang formal. Di sisi lain, terdapat sebagian kalangan umat Islam juga menekankan sisi perlunya mengakomodasi keinginan umat Islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tampaknya pembuat undang-undang cukup jeli dalam membaca situasi ini, sehingga lahir lah kompromi kedua kubu tanpa menimbulkan konflik yang substantial. Hanya saja jika dilihat terminologi yang dipilih oleh pembuat undang-undang, terkesan kurang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam.

Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip operasional dari bank Islam. Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan bank Islam, yakni bank yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Padahal kalau ditilik bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992, maka transaksi yang dilakukan bank berdasarkan prinsip bagi hasil tidak hanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat dilakukan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi dibawah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, bank Islam pada waktu itu dinamakan dengan "*bank berdasarkan prinsip bagi hasil*".

Dahlan Siamat¹⁶⁹ mengatakan dengan diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan kita saat itu disamping bank konvensional yang ada, bank dapat memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak berdasar bunga tapi bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam. Juga diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga

¹⁶⁹ Dahlan Siamat dalam Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, (Bandung : Citra Adytia Bhakti, 2002), hal 43

keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan kita. Di samping itu, pendirian jenis bank bagi hasil ini akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang di dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu, bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dimaksudkan untuk melayani segmen pasar tersebut.

Dengan berdasar hukum UU No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai bank syariah pertama.

1.2 Periode tahun 1998 - sekarang

Istilah Penamaan

Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, terbukti dengan dilikuidasinya bank-bank konvensional namun Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan tanpa suntikan dana dari pemerintah. Hal ini membuat Pemerintah memberikan kesempatan terhadap tumbuh kembangnya bank syariah dengan mengusulkan RUU amandemen UU No. 7 Tahun 1992. Dewan Perwakilan

Rakyat dengan tegas memberikan tambahan istilah "prinsip syariah". UU No. 10 tahun 1998 mengatakan bank sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi, kehadiran pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dimaksud untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pengertian dari prinsip syariah disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam UU No 10 Tahun 1998, eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah disebutkan di dalam usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat dengan perumusan yang berbeda. Untuk bank umum disebutkan pada Pasal 6 huruf m yang berbunyi:

Bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat disebutkan pada Pasal 13 huruf c yang berbunyi:

Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan bank berdasarkan prinsip syariah, yang akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dan ganti pengaturan bank berdasarkan prinsip syariah tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 1999 mengeluarkan peraturan mengenai Bank berdasarkan prinsip syariah, masing-masing dalam :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Dari konsideran menimbanginya kita dapat mengetahui falsafah yang melatar belakangi penetapan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tersebut yang mengandung konstatering fakta-fakta secara singkat serta merupakan alasan-alasan dan pertimbangan perlunya ditetapkan ketentuan tentang bank yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, menyatakan :

“dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan semakin berat, diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani nasabah secara optimal. Karenanya, diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan Indonesia, termasuk perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu guna lebih mendorong perkembangan perbankan syariah tersebut, maka diperlukan pengaturan kegiatan bank syariah yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum.”

Demikian pula dari konsiderans menimbang Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR, kita dapat mengetahui falsafah yang melatarbelakangi penetapannya, yang mengandung konstatering fakta-fakta secara singkat serta merupakan alasan-alasan dan pertimbangan perlunya ditetapkan pengaturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut yang menyatakan :

“Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang semakin berat, diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil secara optimal, baik di pedesaan maupun perkotaan. Karenanya diperlukan pengaturan kegiatan bank syariah yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum, dengan menetapkannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.”

Bank yang boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Bank yang boleh melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 yang diatur pada Pasal 6 dan Pasal 1 angka 3 yaitu

Bank Umum yang melakukan kegiatan secara konvensional diperkenankan juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan cara mendirikan cabang atau kantor di bawah kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah,

atau mengubah kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabangnya yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Bank umum yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan atau tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip syariah atau secara konvensional, walaupun dengan cara membuka kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabangnya. Undang-undang No. 10 tahun 1998 secara khusus memperkenankan Bank Umum Konvensional melakukan kegiatan usaha secara sekaligus (*double*) berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah, yang penyelenggarannya dilakukan terpisah. Sebaliknya juga berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 10 tahun 1998, BPR yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional tidak diperkenankan

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sama berlaku terhadap BPR yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Demikian pula UU No. 10 Tahun 1998 tidak memperkenankan BPR menyelenggarakan kegiatan usahanya sekaligus secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR semata-mata diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka jelas kegiatan bank yang didasarkan pada "*prinsip syariah*" yang dahulu dikenal "*bank berdasarkan prinsip bagi hasil*". Dahulu pada umumnya BPR saja yang melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip syariah, sedangkan bank umum lebih banyak melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Dewasa ini, baik BPR maupun bank umum dapat melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip syariah. Dalam UU No. 10 tahun 1998 dikatakan bahwa Bank Umum dan BPR dapat melakukan kegiatan usaha "*menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia*". Pokok-pokok yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut memuat antara lain:

1. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
2. pembentukan dan tugas Dewan pengawas Syariah;
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan di atas merupakan perubahan dari pengaturan yang sama yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank Umum dan bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kegiatan usaha "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah". Pengaturan yang diubah meliputi :

1. Istilah yang digunakan tidak lagi berdasarkan "prinsip bagi hasil", tetapi diganti dengan "prinsip syariah", yang esensinya sama saja sebagai dasar operasional bank Islam atau syariah;
2. Ketentuan pelaksanaannya tidak lagi ditetapkan dalam peraturan pemerintah, tetapi ditetapkan oleh BI, berhubung pengalihan kewenangan pembinaan dan pengawasan perbankan dari yang semula berada pada menteri keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia;

3. Penerapan prinsip bagi hasil terbatas pada penyediaan dana kepada masyarakat saja, sedangkan penerapan prinsip syariah atau bagi hasil tidak hanya dalam hal penyediaan dana kepada masyarakat saja, tetapi mencakup kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, baik berkaitan dengan kegiatan usaha penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat.

Kegiatan usaha bank syariah

Kegiatan usaha bank syariah dijelaskan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No.10 tahun 1998, yang dibatasi :

- a. mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank
 - b. kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat
 - c. bank umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya.
- Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank umum lebih luas daripada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank perkreditan rakyat. Bagi

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk syariah itu tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yaitu diantaranya, bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi, jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi di antara bank dengan nasabah. Selain itu, produk-produk dari bank syariah seharusnya disesuaikan dengan ajaran-ajaran islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada *counterpart*-nya dalam produk bank umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan, beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang dan ini memang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Diantara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal atau barang perdagangan untuk perusahaan atau orang lain.

Pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 menentukan bahwa usaha bank umum dalam menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha lain berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan ketentuan bank Indonesia. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank umum dengan menerapkan prinsip syariah, dirinci lebih lanjut dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Surat keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR. Dikatakan bank umum syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*;
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
 - c. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* atau ;
 - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
2. Melakukan penyaluran dana melalui :
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 1. *Murabahah*;
 2. *Istisna*;
 3. *Ijarah*;
 4. *Salam*;
 5. Jual beli lainnya.
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 1. *Mudharabah*;
 2. *Musyarakah*;
 3. Bagi hasil lainnya.
 - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 1. *Hiwalah*;
 2. *Rahn*;
 3. *Qardh*.

3. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*;
4. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan /atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah;
5. Memindahkan uang untuk kepentingan diri sendiri dan / atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad damamah*;
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*;
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wadiah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
11. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujr*;
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank umum syariah sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada bank umum syariah atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank umum syariah juga dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak dan sodaqoh, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

Pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa usaha BPR dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yang dirinci lebih lanjut dalam Pasal 27 dan Pasal 28 SK Direksi BI Nomor 32/34/KFP/DIR bahwa BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
 - b. Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*;
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 1. *Murabahah*;

2. *Istisna*;
3. *Ijarah*;
4. *Salam*;
5. Jual beli lainnya.
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 1. *Mudharabah*;
 2. *Musyarakah*;
 3. Bagi hasil lainnya.
- c. Pembiayaan lain berdasarkan prinsip :
 1. *Rahn*;
 2. *Qardh*.
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh DSN.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS jauh lebih sempit atau terbatas dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum Syariah. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha menerima dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadia'*, tidak seperti bank umum syariah. Larangan ini sesuai dengan Pasal 14 UU No. 10 tahun 1998, sebab BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang hanya dijalankan oleh Bank Umum saja.

Pengawasan Bank Syariah

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, yang ditindaklanjuti dengan SK Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR dan SK Direksi BI Nomor

32/36/KEP/DIR, maka pengawasan terhadap bank syariah dilakukan secara rangkap, berupa :

1. Pengawasan umum

Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh BI, sama seperti bank konvensional pada umumnya. BI bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas pembinaan dan pengawas bank. Disamping itu, secara internal bank syariah diawasi pula oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau pengawas bank yang bersangkutan.

2. Pengawasan khusus

Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah ini :

- a. Berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
- c. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional, dengan tugas yang diatur oleh dewan syariah;
- d. Dewan Pengawas Syariah wajib dimiliki oleh setiap bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dahulu berdasarkan PP No. 72 Tahun 1992, pengawasan khusus terhadap bank berdasarkan prinsip bagi hasil hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang dalam organisasi bank yang bersangkutan bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank.

Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah ini adalah melakukan pengawasan secara intern atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat,

agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk atau jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, ditinjau dari sudut syariah. Oleh karena itu, anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah dapat berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan kalau fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam bank berdasarkan prinsip bagi hasil berbeda dengan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas Bank, yang juga dimiliki oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut. Fungsi Dewan Pengawas Syariah semata-mata terbatas pada meneliti dan menentukan suatu produk, jasa atau kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip *syariah*. Sebaliknya, fungsi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas Bank melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dan manajemen bank berdasarkan prinsip syariah tadi.

Pengembangan perbankan syariah nasional pada tahap I (Meletakkan Fondasi Pertumbuhan) yaitu dengan dibuatnya naskah akademik rancangan undang-undang perbankan syariah oleh Bank Indonesia dengan mendapatkan masukan dari kalangan akademisi (UI, UII) dan praktisi (BI menugasi Law Offices of REMY & DARUS). Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**¹⁷⁰ perkembangan bank syariah harus didukung dengan adanya undang-undang tersendiri bagi bank syariah yang terlepas dari undang-undang perbankan karena :

- a. Banyak jenis jasa bank syariah yang tidak atau tidak dapat ditawarkan oleh bank konvensional. Hal itu karena undang-undang perbankan melarang bank umum dan bank perkreditan rakyat melakukan kegiatan tersebut. Menurut Pasal 10 UU No. 10 tahun 1998, bank umum hanya boleh melakukan usaha-usaha yang jenis-jenisnya telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perbankan. Sedangkan BPR hanya boleh melakukan kegiatan usaha yang jenisnya telah ditentukan dalam Pasal 13 dan dilarang melakukan kegiatan yang

¹⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat*, Makalah disampaikan pada Seminar "Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan, diselenggarakan oleh Business Reform and Construction (BRRC), Jurnal Hukum Bisnis, Law Offices of REMY & DARUS bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia di Ruang Gedung Serba Guna Gedung B Lantai 3, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, 18 Juli 2002.

ditentukan dalam Pasal 14 Undang-undang perbankan.

Antara lain:

1. Bank umum dilarang melakukan kegiatan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. BPR dilarang melakukan penyertaan modal, sekalipun pada bank dan lembaga keuangan. Salah satu jenis kegiatan bank syariah adalah transaksi penyertaan antara lain dalam bentuk *musyarakah* atau disebut *participation financing*.
 2. Bank konvensional dilarang melakukan transaksi jual beli barang, sedangkan salah satu jenis usaha perbankan syariah adalah melakukan transaksi jual beli dengan bentuk *murabahah*, *bai'assalam* dan *istisna'*
 3. Bank syariah dapat melakukan *leasing* yang disebut *ijarah* dan *ijarah wa istisna'* yang menurut Undang-undang Perbankan tidak boleh dilakukan oleh bank konvensional.
- b. Sebagian besar dari aset perbankan konvensional adalah dalam bentuk *fixed interest instrumens* yang relatif mudah dinilai. Disamping itu perbankan tradisional memiliki metode untuk melakukan penilaian *asset* perbankan konvensional yang telah diakui apabila *asset* tersebut menjadi tidak produktif (menjadi *non performing loan*). Sebaliknya adalah sulit sekali untuk menilai *asset* perbankan syariah misalnya yang berupa saham di suatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan perjanjian *musyarakah*.
- c. Sistem akuntansi bank syariah berbeda dengan konvensional. Sehingga dengan demikian, maka laporan

keuangan neraca laba rugi bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

- d. Ketentuan perpajakan bagi perbankan konvensional tidak dapat diterapkan pada bank syariah. Bunga (*interest*) yang dibebankan oleh bank konvensional merupakan pendapatan yang pasif (*passive income*), sedangkan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan *earned income* yang dilihat dari aspek hukum pajak harus diperlakukan berbeda. Selain itu *trade financing* yang merupakan jasa perbankan, berlaku ketentuan bahwa pengalihan hak terjadi dua kali yang pertama dari penjual kepada bank dan yang kedua terjadi kemudian yaitu dari bank kepada pembeli, sehingga dengan demikian terhadap rekening itu dikenai pajak dua kali yang akibatnya lebih lanjut akan mengurangi pendapatan perusahaan.
- e. Rambu-rambu kesehatan (*prudential standards*) yang diberlakukan bagi bank-bank konvensional tidak tepat diterapkan pada bank syariah atau bagi bank konvensional yang melakukan kegiatan bank syariah.
- f. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan mengenai bank syariah dan perbankan syariah di dalam undang-undang perbankan masih sangat sedikit dan jauh dari lengkap

bagi kebutuhan pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah.

- g. Tumbuhnya perbankan syariah bukanlah merupakan fenomena sementara saja tetapi harus dilihat sebagai fenomena yang akan berlanjut seterusnya dan akan berkembang makin lama makin besar dan meluas di seluruh dunia.

Naskah akademis RUU perbankan syariah memuat uraian tentang gagasan awal penyusunan undang-undang perbankan syariah berdasarkan alasan-alasan yang bersifat akademik. Gagasan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan cita-cita Negara dalam rangka mewujudkan cita-cita UUD dan dijabarkan dalam GBHN melalui ekonomi kerakyatan yang demokratis dan berkeadilan. Amanah tersebut dituangkan dalam propenas di bidang ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Pengembangan perbankan syariah yang dapat melayani sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan alternatif dari perbankan nasional.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah disempurnakan dalam UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 mengatur

keberadaan perbankan syariah. Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat sepenuhnya mencakup karakteristik operasional perbankan syariah. Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah belum dapat dilakukan secara optimal. Sejauh ini BI selaku otoritas perbankan termasuk perbankan syariah telah mengatur perbankan syariah melalui ketentuan tentang Pasar Uang antar bank syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, Giro Wajib Minimum, serta kliring.

Mengingat kekhususan operasionalnya dan keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki serta memperhatikan hasil penelitian yang menunjukkan tingginya tuntutan dan dukungan terhadap bank syariah, kerangka peraturan yang belum memadai, dukungan pemerintah yang kondusif, pertumbuhan volume usaha yang pesat, perkembangan lembaga keuangan syariah internasional, serta hasil kajian perbandingan terhadap negara-negara yang telah mempraktekkan perbankan Islam, maka perbankan syariah membutuhkan undang-undang yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Tujuan undang-undang tersebut adalah mendukung terwujudnya sistem perbankan yang

selain patuh terhadap prinsip syariah, juga dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan berhati-hati.

Dengan demikian terdapat urgensi pengaturan undang-undang perbankan syariah secara tersendiri. Urgensi dari aspek yuridis menekankan pada cakupan aspek syariah dan hukum positif. Pada aspek syariah sebagai serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajarannya secara menyeluruh, integral dan komprehensif. Dengan demikian pelaksanaannya tercemin dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi dan juga dalam industri perbankan.

Sedangkan dalam aspek hukum positif terkait dengan implementasi Pasal 29 UUD 1945 kedalam kehidupan perekonomian bangsa, Negara berkepentingan memberikan legalitas hukum bagi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan masyarakat. Sedangkan dari urgensi regulasi, perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian global. Lahirnya bank syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh praktik perbankan Islam di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan, Sudan, Yordania, dan Iran terbukti telah memiliki pengaturan perbankan syariah tersendiri dengan

tujuan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penyusunan naskah akademik RUU perbankan syariah tidak lepas dari keinginan masyarakat terhadap bank syariah. Berdasarkan penelitian tim peneliti penyusun naskah akademik RUU perbankan syariah¹⁷¹, disimpulkan bahwa perbankan syariah sangat dibutuhkan sehingga diperlukan ketentuan dan peraturan tersendiri bagi bank syariah yang mempunyai karakteristik berbeda dari bank konvensional sebagai landasan hukum bagi pengembangan perbankan syariah.

Substansi naskah akademik RUU Perbankan syariah berisi asas-asas dan norma-norma hukum yang harus dituangkan dalam materi pokok peraturan hukum, yang bersifat mengatur, menyuruh (mewajibkan), melarang, membolehkan (memberi hak dan wewenang), membatasi kegiatan dan transaksi perbankan syariah, dan mendorong serta mengarahkan pengembangan dan perkembangan perbankan syariah, dan memberi sanksi terhadap pelanggaran kegiatan penyelenggaraan perbankan syariah. Operasional perbankan syariah memiliki landasan teoretis dan

¹⁷¹ Penelitian Tim Peneliti penyusunan Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah, Juli-Juni 2002 dalam *Naskah Akademik RUU Tentang Perbankan Syariah*, disusun BI-Law Office of Remy & Darus, (Jakarta, Oktober 2002) hal 93-95

karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, materi pengaturannya tunduk pada ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang berlaku terhadap kegiatan perbankan pada umumnya, juga akan tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis*) yang hanya berlaku bagi perbankan syariah, yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi bank konvensional. Substansi naskah akademik RUU Perbankan syariah selain dari elaborasi prinsip-prinsip syariah juga dari hasil studi banding terhadap peraturan di Malaysia yaitu *Malaysian Islamic Banking Act 1983* yang diundangkan 7 April 1983¹⁷².

Sistematika RUU perbankan syariah disusun dalam naskah akademik RUU Perbankan Syariah sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan Umum

Dalam bab ini dirumuskan terminologi atau istilah-istilah yang digunakan dalam konsep RUU bank syariah, di antaranya mengenai apa yang dimaksudkan dengan "pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah, produk-produk bank syariah seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, ijarah wa iqtina*"

¹⁷² Sudin Haron, *Islamic Banking Rules & Regulations*, (Malaysia : Pelanduk, 1997), hal

Bab II : Asas, Tujuan dan Fungsi

Memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh suatu bank syariah dalam menciptakan dan melaksanakan transaksi-transaksi atau produk-produknya. Selain asas-asas, dalam bab ini, akan dimuat pula apa yang menjadi tujuan perbankan syariah di Indonesia dan untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang menjadi fungsi bank syariah dalam rangka pembangunan nasional.

Bab III : Perizinan, Bentuk Hukum dan Kepemilikan

Berisi aturan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan bank syariah, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor di bawah cabang pembantu. Selain itu, hal lain yang perlu diatur adalah siapa (warga Negara atau badan hukum Indonesia atau warga Negara Asing yang dapat menjadi pemilik suatu bank umum syariah dan 3PRS. Di dalam bab ini akan ditentukan pula jenis-jenis bank syariah yang dapat melakukan kegiatan usahanya secara internasional, secara nasional, secara regional dan secara lokal.

Bab IV : Permodalan

Di dalam bab ini ditentukan sumber-sumber dana yang dilarang untuk menjadi sumber permodalan bank syariah. Di samping itu, ditentukan pula besarnya modal minimum bagi bank umum syariah dan BPRS.

Bab V : Jenis dan Usaha Bank

Berisi aturan mengenai jenis-jenis bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jenis bank tersebut terbagi atas bank umum syariah dan BPRS.

Bab VI : Rambu-rambu Kesehatan dan Kewajiban Menjaga Resiko

Bab ini akan menguraikan berbagai aturan rambu kesehatan bank (*prudential principle*). Di samping itu, akan dimuat pula ketentuan mengenai kewajiban bank untuk melakukan *risk management* dengan sebaik-baiknya sebagai implementasi dari ketentuan internasional.

Bab VII : Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Membahas aturan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pengurus, pelaksanaan

fit and proper test bagi calon anggota pengurus, serta syarat-syarat pemberhentian pengurus bank syariah. Selain itu ditentukan pula syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai pengurus bank syariah dan prosedur pengangkatannya, termasuk pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Dalam bab ini, dimuat pula ketentuan mengenai ketentuan Dewan Pengawas Bank Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

Bab VIII : Penggunaan Tenaga Asing

Dalam bab ini dimuat ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan anggota pengurus yang berkewarganegaraan asing dan penerimaan tenaga asing sebagai pegawai dan konsultan.

Bab IX : Sistem Akuntansi dan Perpajakan

Bab ini memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bagi bank syariah berlaku sistem akuntansi bank konvensional. Sistem akuntansi yang dimaksud akan ditentukan dan diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (pada saat ini, adalah BI). Dalam bab ini akan dimuat pula ketentuan yang

menegaskan bahwa sistem perpajakan bagi bank syariah berbeda dengan sistem perpajakan yang berlaku bagi bank konvensional. Sistem perpajakan tersebut akan ditentukan dan diatur oleh Menteri Keuangan.

Bab X : Rahasia Bank

Dalam bab ini dibahas tentang aturan kewajiban bank untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, serta hal-hal yang dikecualikan terhadap berlaku ketentuan rahasia bank.

Bab XI : Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam bab ini ditentukan siapa yang menjadi otoritas pengatur perbankan syariah, siapa yang menjadi otoritas pengawas dari perbankan syariah. Dalam bab ini juga, ditentukan bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh otoritas pengawas, yaitu antara lain melalui sistem pelaporan dengan menyebutkan jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh bank syariah dan pengawasan melalui pemeriksaan setempat kepada banknya.

Bab XII : Pasar Keuangan dan Pasar Modal

Memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pasar uang dan pasar modal perbankan syariah serta instrument-instrumennya.

Bab XIII : Pembakuan Akad

Mengatur mengenai hal-hal apa saja yang diwajibkan dan dilarang (rambu-rambu) sehubungan dengan pembuatan akad-akad baku yang digunakan oleh bank syariah. Di samping itu, ditentukan pula konsekuensi atau sanksi hukum apabila rambu-rambu tersebut dilanggar.

Bab XIV : Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Saham

Memuat ketentuan-ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi saham bagi bank syariah.

Bab XV : Tindakan Penyehatan Bank Syariah

Dalam bab ini diatur hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang terhadap bank jika mengalami kesulitan yang membahayakan perekonomian nasional.

Bab XVI : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Bab ini memuat penentuan ancaman-ancaman pidana dan administratif bagi pihak-pihak yang melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditentukan dalam UU ini.

Bab XVII : Ketentuan Peralihan

Dalam bab ini ada aturan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Penegasan izin usaha bank yang ada setelah undang-undang baru berlaku.
2. Kewajiban lembaga keuangan yang sebelumnya memperoleh izin usaha dari menteri Keuangan untuk menyesuaikan kondisi dengan ketentuan-ketentuan dalam UU ini dan batas jangka waktu penyesuaian tersebut.
3. Penentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana saja yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau dicabut oleh UU ini.

Bab XVIII : Ketentuan Penutup

Memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. penentuan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini.
2. undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG

Umum

Pasal demi pasal

Perkembangan hukum perbankan syariah merupakan dasar hukum bagi tumbuh kembangnya perbankan syariah. Perkembangan hukum perbankan syariah dimulai dari UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian diundangkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan bagi eksistensi bank syariah melalui sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang berlaku pada sebuah negara dan berdasarkan undang-undang tersebut memungkinkan beroperasinya *dual banking system*, yaitu bank umum konvensional dapat membuka kantor cabang syariah. Saat ini telah dibuat naskah akademik RUU Perbankan Syariah yang

disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Law Office of REMY & DARUS, yang diharapkan ditindaklanjuti dengan penyusunan RUU Perbankan Syariah¹⁷³ sehingga dapat terwujud Undang-undang Perbankan Syariah yang diatur terpisah dari Undang-undang perbankan konvensional.

Perkembangan hukum perbankan syariah terjadi karena adanya aspirasi dari masyarakat yang menginginkan terjadinya perubahan agar pengaturan perbankan syariah lebih spesifik sesuai dengan karakteristik bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Nonet-Shelznick menyatakan dalam teorinya tentang konsepsi tipe hukum responsif (selain konsepsi tipe hukum represif dan otonom), yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat¹⁷⁴. Lebih lanjut Nonet-Shelznick mengatakan:

A third type of law strives to resolve that tension. We call it responsive, rather than open or adaptive, to suggest a capacity for responsible, and hence discriminate and selective, adaptation. A responsive institution retains a grasp on what is essential to its integrity while taking account of new forces in its environment¹⁷⁵.

¹⁷³ Dani Gunawan, Anggota Tim Penyusun RUU Perbankan Syariah, Wawancara 2 Maret 2005 menyatakan penyusunan RUU Perbankan Syariah dilakukan secara intern di lingkungan Direktorat Perbankan Syariah BI.

¹⁷⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Semarang: Penerbit Agung Press, 1989), hal 42 -

¹⁷⁵ Philippe Nonet, Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, (New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper Colophon Books Harper & Row, Publishers 1978), hal 77

Dijelaskan bahwa dalam berbagai lapangan hidup, timbul keinginan-keinginan untuk mencapai hukum responsif, yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dalam konsepsi hukum responsif ditekankan pentingnya makna dari sasaran kebijakan, dan penjabaran juridis dari reaksi kebijakan, serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan.

2. Prospek pasar bank syariah

Prospek pasar bank syariah khususnya di Semarang cukup cerah didukung dengan jumlah penduduk Semarang 1.378.193 jiwa¹⁷⁶ dan yang muslim 1.154.109 jiwa. Disamping itu nasabah bank syariah tidak terbatas pada penduduk muslim. Ada juga nasabah yang non muslim menabung di bank syariah.¹⁷⁷ Potensi pendukung lainnya bila dikelola dengan baik

¹⁷⁶ BPS Kota Semarang 2003

¹⁷⁷ Khusnul, Teller BNI Syariah Semarang

akan terbuka peluang bagi bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional.

Prospek bank syariah masih luas dengan makin meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai ajaran agama oleh masyarakat. Hal lainnya sebagaimana diungkapkan oleh tokoh MUI,¹⁷⁸ bahwa prospek perbankan syariah sangat tergantung dengan manajemen yang baik dan profesional, jujur, adil, transparan dari pengelola bank syariah itu sendiri. Menurut penulis selain itu juga cara pegawai dari bank syariah dalam memberikan pelayanan (dengan senyum, salam, sapa, penuh keramahan) serta sosialisasi dari bank yang bersangkutan juga sangat berpengaruh.

Keunggulan bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah bahwa bank syariah tidak akan mengalami *negatif spread*, karena bank syariah tidak membayar bunga setiap bulannya sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, adanya kemitraan dan keadilan dalam berusaha dengan prinsip bagi hasil nasabah yang sudah memahami betul tentang karakteristik bank syariah akan merasa aman dan bahagia dengan system perbankan syariah.

Potensi pasar yang paling menjanjikan adalah jumlah umat Islam yang sangat besar, merupakan jumlah penduduk

¹⁷⁸ Ahmad Rofiq, Sekretaris MUI Jateng, Wawancara Pribadi 17 Februari 2005

terbesar di dunia, merupakan potensi yang tidak akan habis-habisnya, sehingga akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi operasionalisasi bank syariah pada masa datang, mengingat dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan ajaran agamanya, maka secara otomatis masyarakat muslim akan merasa nyaman dengan menggunakan bank syariah daripada menggunakan bank konvensional yang diyakini mempraktekkan riba yang dilarang oleh agama Islam sebagai agama yang benar dan sempurna.

3. Strategi pengembangan bank syariah

3.1 Misi, Visi Pengembangan Bank Syariah

Misi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip syariah serta mampu berperan dalam sektor riil, meliputi :

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;

- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- d. Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas perbankan syariah.

Dalam pengembangan bank syariah, BI mempunyai visi pengembangan yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pengembangan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

3.2 Latar belakang kebijakan pengembangan bank syariah nasional

Latar belakang kebijakan pengembangan bank syariah nasional yaitu :

1. Pengembangan perbankan syariah nasional dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah
 - b. Mengadopsi potensi manfaat dan *advantages* yang dapat diberikan oleh sistem perbankan syariah

2. Dasar hukum pengaturan dan pengembangan : UU No. 10 tahun 1998 dan didukung oleh UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004.¹⁷⁹

3.3 Potensi Pengembangan Bank syariah

Pertumbuhan bank syariah didukung dengan adanya potensi-potensi yang ada di Indonesia yaitu :

1. Potensi jumlah umat Islam di Indonesia

Umat Islam di Indonesia mencapai 80 % dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia sehingga terdapat potensi yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan bank Syariah.

2. Potensi masyarakat yang memandang bunga bank riba

Potensi ini muncul sebagai wujud adanya larangan terhadap bunga bank (riba) dari beberapa agama. Larangan dari agama Islam tersebut dalam Qur'an¹⁸⁰:

"Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan "Perdagangan itu

¹⁷⁹ Biro Perbankan Syariah, Makalah "Perkembangan dan Arah Kebijakan Perbankan Syariah Nasional" disampaikan pada Training For Trainers FE-UII, Yogyakarta, 9-10 September 2003

¹⁸⁰ Baca Surah Al-Baqoroh Ayat 275, 276 dan 278, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995)

sama saja dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mereka memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya". (QS. Al Baqoroh : 275)

"Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan ia menyuburkan sedekah". (QS. Al Baqoroh : 276)

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqoroh : 278)

Masih ada masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah bantal seperti yang terjadi pada seorang pengusaha di Malang Jawa Timur karena tidak mau menabungkan uangnya pada bank konvensional yang menerapkan bunga.¹⁸¹

Jadi dengan prinsip menolak bunga bank tersebut jelaslah bahwa bank syariah dapat mengakomodir kebutuhan umat Islam.

¹⁸¹ Hasil Penelitian Bank Indonesia, disampaikan oleh Yuslan Fauzi, Peneliti Bank Indonesia, dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se-Indonesia, 11-13 Mei 2000 di Universitas Diponegoro Semarang.

3. Potensi karakteristik produk bank syariah

Produk-produk bank syariah memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan bank konvensional. Dengan tidak dikenalnya bunga pada bank syariah menjadikan setiap bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Adapun produk-produk bank syariah tersebut diantaranya:

1. Produk-produk penghimpunan dana
2. Produk-produk pembiayaan
3. Produk-produk jasa perbankan
4. Penghimpunan zakat-infak sedekah (ZIS).

4. Potensi pembiayaan

Pembiayaan pada bank syariah mempunyai karakteristik tertentu dimana pembiayaan dilakukan pada sektor usaha produktif dan sesuai prinsip syariah Islam. Tidak mengandung *gharar* dan *maisir*. Pembiayaan yang dilakukan tidak semata-mata hanya profit oriented saja, namun ada ketentuan syariah yang harus dipatuhi, dimana dengan nilai-nilai tersebut sebuah pembiayaan yang dilakukan harus memiliki manfaat bagi umat. Pembiayaan juga berdasarkan prinsip kemitraan. Kemitraan yang dibangun oleh Bank Islam tidaklah sekedar hubungan

antara bank dan nasabah saja. Namun lebih jauh dari itu bank syariah juga ikut terlibat dalam proses bisnis mitra usahanya. Kemitraan juga berarti menjadi konsultan usaha bagi pembiayaar yang dilakukan bersama (*musyarakah*). Keunggulan bank syariah yang tidak mengenal bunga menjadikan prinsip bagi hasil yang bersifat *win-win solution* akan memberikan keadilan yang dapat menciptakan kesejahteraan.

5. Potensi investasi asing dari investor yang tertarik dengan pola usaha bank syariah

Dalam jangka panjang dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia akan mampu mendorong aliran modal masuk melalui investor asing yang tertarik dengan pola transaksi dan usaha Bank Syariah. Potensi yang begitu besar akan mendorong perkembangan perbankan syariah. Investor dari Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah potensi yang terbesar. Beberapa alasan yang mendukung, yaitu:

1. populasi umat Islam Indonesia adalah terbesar di dunia. Artinya ada potensi pasar yang cukup besar bagi perbankan di Indonesia.

2. perkembangan Bank Syariah di Indonesia baru memasuki tahap sosialisasi dan pengenalan pasar, masih memerlukan modal yang lebih untuk mengembangkan usaha.
3. beberapa Negara OKI adalah Negara-negara yang kaya modal.
4. volume perdagangan antara Negara-negara OKI yang masih kecil yang masih dapat ditingkatkan untuk kerjasama yang lebih besar lagi. Menggagas kerjasama perdagangan antara Negara Islam akan meningkatkan kinerja dan standar hidup di masing-masing Negara, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara maju. Perdagangan yang dibangun akan membuka jalan masuknya modal, dan dapat pula memanfaatkan dana Bank Syariah.

Kelima potensi tersebut merupakan modal dalam pengembangan bank syariah di Indonesia.

3.4 Sasaran Pengembangan Bank Syariah

Bank Indonesia telah menyusun strategi pengembangan dalam "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Sasaran pengembangan perbankan syariah

sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut adalah :

1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan;
 - Tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
 - Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrument maupun badan terkait);
 - Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah;
 - Terwujudnya pengaturan dan pengawasan berbasis resiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung dengan SDI yang handal;
 - Diterapkannya kebijakan *entry* dan *exit* yang sehat;
 - terwujudnya *real time supervision*;
 - Terwujudnya *self regulatory*.
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; yang ditandai dengan:
 - Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;

- Terwujudnya aliansi strategis yang efektif;
 - Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga pendukung.
4. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan:
- Terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;
 - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah diseluruh Indonesia dengan target pangsa pasar sebesar 5% dari total asset perbankan nasional;
 - Terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat;
 - Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.

3.5 Pentahapan Pencapaian sasaran pengembangan perbankan syariah

BI juga melakukan pentahapan pencapaian sasaran pengembangan perbankan syariah nasional (2002-2011).

Terdapat 3 (tiga) tahap :

1. Tahap 1 : Meletakkan Fondasi Pertumbuhan (2002-2004)

- a. Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah
- c. Mendorong pertumbuhan kantor keseluruhan wilayah yang potensial dan penetrasi pasar

2. Tahap 2 : Memperkuat Struktur Industri (2004-2008)

- a. Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung
- b. Meningkatkan kompetensi, skill dan professional lembaga dan pelaku perbankan syariah
- c. Meningkatkan fungsi intermediasi, efesiensi dan daya saing industri perbankan syariah.

3. Tahap 3 : Memenuhi Standar Keuangan dan Mutu Pelayanan Internasional (2008-2011)

- a. Meningkatkan kinerja bank syariah agar minimal setara dengan bank konvensional dan bank syariah internasional
- b. Meningkatkan *service excellent* dan ketataan terhadap prinsip syariah

- c. Mendorong peningkatan pembiayaan langsung dengan performa baik¹⁸².

3.6 Permasalahan dan tantangan utama

1. Kerangka pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap dan sesuai dengan keunikan karakteristik perbankan syariah
2. Jaringan kantor yang terbatas yang menentukan akses perbankan syariah terhadap nasabah potensial
3. Potensi pasar relatif besar namun pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum tentang produk, jasa dan manfaat perbankan syariah relatif rendah.
4. Infrastruktur dan institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif
5. Perlunya peningkatan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan secara berkesinambungan agar dapat berdaya saing, memperbesar pangsa pasar, menarik SDM professional dan permodalan
6. Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakekat bank syariah

¹⁸² Biro Perbankan Syariah, Makalah "*Perkembangan dan Arah Kebijakan Perbankan Syariah Nasional*", disampaikan pada Training For Trainers FE-UII, Yogyakarta, 9-10 September 2003

7. Agar dapat berkompetisi dalam era globalisasi perlu mengadopsi *best practice* dan standar keuangan internasional¹⁸³.

Menurut Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, potensi yang dimiliki akan terwujud bila pemerintah beserta otoritas pengawas dan pengatur perbankan syariah serta seluruh pelaku industri keuangan syariah mengambil langkah-langkah yang tepat serta memiliki keuletan, ketekunan dan visi ke depan.¹⁸⁴

Dalam kaitannya dengan pengembangan perbankan syariah, Adiwarmanto A Karim¹⁸⁵ bahwa diperlukan penyusunan konsep dan strategi dengan visi yang jelas, bertahap dan berkesinambungan dengan prinsip syariah. Karena itu pengembangan perbankan syariah pada dasarnya mempertimbangkan dua sisi yaitu sisi *demand* dan *supply*. Sisi *demand* menekankan pada pengembangan kecenderungan *market driven* yaitu berdasarkan pertimbangan mekanisme pasar pengguna perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan sisi *supply* menekankan pada aspek kemampuan perbankan syariah dalam

¹⁸³ Ibid

¹⁸⁴ Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI dan Ketua Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam sidang tahunan keempat IFSB, Nusa Dua Bali, awal April 2004

¹⁸⁵ Adiwarmanto A Karim, *Realita dan Regulasi dan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Perbankan, Asuransi Pasar Modal, PT Asuransi Syariah Mubarakah, 30 Mei 2002

memaksimalkan pelayanan dan kepuasan terhadap nasabah. Keberhasilan pengembangan perbankan akan sangat bergantung pada pengelolaan sisi pemerataan dan sisi penawaran produk dan layanan perbankan syariah.

Fathurrahman Djamil¹⁸⁶ menyatakan bahwa strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilaksanakan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini. Salah satu yang penting dilakukan dalam upaya pengembangan ini adalah perlunya penyempurnaan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah. Ketentuan tersebut yang utama adalah undang-undang. Strategi pengaturan pengembangan ini diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berjalan sesuai dengan *nature business* bank syariah itu sendiri.

3.7 Perkembangan Kelembagaan, Sumber Daya Insani, Pendidikan dan Operasional Perbankan Syariah

Secara institusional, dalam tahun 2004 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 3 bank umum syariah, 15 unit

¹⁸⁶Fathurrahman Djamil, Makalah *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 20, 2002 hal 43

usaha syariah (UUS) dari bank umum konvensional dan 88 BPRS. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya konversi 1 bank umum konvensional (Bank Tugu) menjadi bank umum syariah yaitu Bank Umum Syariah Mega Indonesia, dibukanya 7 UUS dari bank umum konvensional khususnya bank-bank pembangunan daerah yaitu Bank DKI, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Sumut dan BPD Aceh, Bank Niaga dan bank Permata. Ijin operasional juga telah diberikan kepada 5 BPRS (satu konversi) yaitu BPRS Situbondo, BPRS Tenggamas, BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Artha Surya Barokah dan BPRS Bhakti Sumekar. Meski demikian terdapat satu BPRS yang dicabut ijin usahanya yaitu BPRS Dharma Amanah.

Disamping peningkatan jumlah bank yang beroperasi, jaringan kantor bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Jumlah kantor bank syariah (termasuk kantor kas dan kantor cabang pembantu) bertambah 96 kantor dari jumlah 337 kantor pada akhir tahun 2003 menjadi 443 kantor pada akhir tahun 2004 (Tabel 9).

Tabel 9

Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2000	2001	2002	2003	2004
Bank Umum Syariah	2	2	2	2	3
Unit usaha Syariah	3	3	6	8	15
Jumlah kantor	62	96	127	253	355
BPRS	78	81	83	84	88
TOTAL	140	177	210	337	443

Data BI Januari 2005

Pertumbuhan jumlah dan jaringan kantor bank syariah tersebut disamping sejalan dengan dengan hasil penelitian BI mengenai potensi pengembangan perbankan syariah di sejumlah daerah, juga tidak terlepas dari kebijakan BI yang mendukung perluasan jaringan kantor bank syariah khususnya di luar wilayah wilayah ibukota propinsi. Dengan demikian jaringan perbankan syariah terdapat di hampir sebagian besar propinsi.

Dalam bidang Sumber Daya Insani, Bank Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan seminar, antara lain :

- a. Pelatihan operasional Bank Syariah terhadap SDM perbankan yang berminat untuk mengembangkan bank syariah yang dilaksanakan baik oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga pelatihan di Indonesia, atau dengan lembaga pendidikan luar negeri seperti

dengan *Islamic Research and Training Malaysia*,
Bahrain Institute of Banking and Finance Research
Centre University of Loughborough Inggris.

- b. Workshop mengenai perbankan syariah di bidang usaha dan produk *Islamic Banking*, standar internasional untuk audit dan akuntansi bagi bank syariah (*International Standar of Accounting and Auditing Organization for Islamic Banks*), Sistem Teknologi informasi bagi Perbankan Islam (BIRT).
- c. Penyelenggaraan seminar atau sebagai pembicara seminar atau diskusi yang terkait dengan kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia¹⁸⁷

Dalam pengembangan perbankan syariah dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi. Beberapa perkembangan sampai dengan penelitian ini dilakukan yaitu dengan semakin bertambahnya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, lembaga pendidikan yang *concern* terhadap ekonomi Islam, pembakuan istilah ekonomi Islam, adanya lembaga *research and consulting* ekonomi Islam, terobosan teknologi dalam produk-produk bank syariah, adanya *shariah award*, dan sebagainya. Selengkapnya akan diuraikan satu persatu.

¹⁸⁷ Achyar Iljas, "Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Bank Syariah, makalah, Seminar Nasional Perbankan Syariah diselenggarakan oleh STAIN Surakarta SEM Institute Yogyakarta, 22 Juli 2000, hal 11.

1. Lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri pada bidang perbankan syariah ataupun membuka Kajian Ekonomi Islam seperti :
 - a. *Institute Bankir Indonesia* (IBI), alamat di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan.
 - b. *SEM Institute (Shariah & Economic Institute)*, alamat di Jl. H. Djuanda, Ciputat Jakarta
 - c. *Tuzkia Institute*, alamat Jl. Lenteng Agung Pasar Minggu Jakarta.
 - d. *SEBI (Sharia Economic & Banking Institute)*, alamat di Jl. Margonda Raya Depok.
 - e. *MI (Muamalat Institute)*, alamat di Gedung Artaloka Lt. 13, Jl. Jend Sudirman No. 2 Jakarta.
 - f. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta
 - g. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Walisongo Semarang
 - h. Universitas Indonesia (Pusat Kajian Islam Dan Timur Tengah), Depok
 - i. UII (Universitas Islam Indonesia)
 - j. Universitas Brawijaya Malang
 - k. Universitas Airlangga Surabaya
 - l. STAIN Malang

m. IAIN Sumatera Utara

n. *Sharia Economics Bisnis Institute*, Yogyakarta

2. Selain itu mahasiswa yang memang tertarik pada kajian ekonomi Islam juga membuka kelompok studi tentang ekonomi Islam seperti :

a. *Islamic Studies of Economic Group* – Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran

b. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

c. Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Fakultas Ilmu Sosial UNNES

d. Forum Studi Islam – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta

e. Kelompok Studi Ekonomi Islam BEM Universitas Negeri Jakarta

f. Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam (PPBEI) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

3. Lembaga Konsultan Ekonomi Islam dan Lembaga Penelitian Ekonomi Islam juga ada seiring dengan kebutuhan masyarakat, seperti :

a. *Tazkia Consulting*

b. *The Registered Fellow in Islamic Finance (PFIF) The International Institute of Islamic Thought* di Jakarta

c. *Center for Islamic Economic Research and Application*
(CIERA)

d. *KARIM Business Consulting*

4. Pada aspek istilah-istilah yang digunakan pada dunia perbankan syariah menggunakan bahasa arab.

Hal ini membuat kesulitan tersendiri bagi masyarakat awam untuk memahaminya, terutama bagi yang pertama kali berhubungan dengan bank syariah. Dan ini merupakan salah satu keengganan masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan. Misalnya istilah *murabahah*, *mudharabah*, *wadiah*, *qardhul hasan*. Timbul kesan bahwa produk dan peristilahan di bank syariah rumit dan asing.

Untuk menghilangkan kebingungan tersebut, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, sedang menyusun dan membakukan istilah-istilah ekonomi Islam. Tidak hanya berkaitan dengan bidang perbankan namun juga istilah-istilah ekonomi Islam secara umum. Menurut **Abdul Gaffar**¹⁸⁸ pembakuan dan penyelarasan istilah ekonomi Islam dilakukan bekerjasama dengan Dewan Bahasa Malaysia dan Brunie Darussalam dalam wadah Majelis

¹⁸⁸ Direktur Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional

Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia (Mabbini)¹⁸⁹.

Ketiga Negara ini merasa perlu untuk membakukan istilah ekonomi Islam karena seiring dengan perkembangan bank syariah di ketiga Negara yang memang menuntut untuk dibakukannya istilah ekonomi Islam dalam sub bidang agama Islam karena lebih spesifik. Secara teknisnya Pusat Bahasa Diknas dan Panitia Kerjasama Kebangsaan (Pakersa) serta beberapa pakar ekonomi Islam melakukan Rapat Kerja untuk menghimpun istilah ekonomi Islam yang berasal dari bahasa Arab dan dicari padanannya di bahasa Indonesia. Dan mungkin berkaitan dengan ekonomi umum yang sudah ada atau langsung diserap dari istilah Arab, seperti kata *mudharabah*. Hasil kerja sama ini akan dihimpun dalam glosarium yang diharapkan tahun 2005 dapat selesai.

5. Adanya Syariah Award yang diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia. Menurut A Riawan Amin¹⁹⁰, penganugerahan ini dilakukan sebagai wujud terimakasih dan juga sebagai pemacu agar semakin banyak pihak yang terlibat dalam memberikan sumbangan terbaik bagi

¹⁸⁹ Lembaga ini didirikan tahun 1974 dimaksudkan untuk menggalang kerjasama kebahasaan di ketiga Negara yang scrumpun ini (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam)

¹⁹⁰ Presiden Direktur Bank Muamalat

pengembangan bank syariah di Indonesia. Seleksi dari para kandidat penerima award dilakukan dewan juri yang beranggotakan Sofyan Syafri Harahap dan M Syakir Sula. Pada tahun 2004, tokoh-tokoh yang dianugerahi syariah award yaitu :

a. Prof. Dr. Thobby Mutis. Beliau dipandang dari nilai *rahmatan lil alamin* telah memberikan sumbangsih nyata dalam pengembangan kajian dan ekonomi syariah. Dalam kepemimpinannya telah mendirikan program studi ekonomi syariah mulai dari jenjang S1 hingga S3. disamping itu juga memfasilitasi pembukaan kantor kas Bank Syariah Mandiri di universitas Trisakti dan dalam waktu dekat akan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Universitas Trisakti. ini menunjukkan bahwa memang ajaran Islam *rahmatan lil alamin* dan Thoby Muis juga berpendapat bahwa riba tidak saja dilarang oleh agama Islam tetapi juga oleh agama-agama besar dunia lainnya.

b. KH. Ma'ruf Amin dari kategori ulama. Beliau merupakan tokoh penting dalam proses *ijma'* ulama Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram,

pada pertengahan Desember tahun lalu. Padahal dalam sebagian pembahasan tentang halal atau haramnya bunga bank masih belum tuntas. Sikap tegas dan konsisten KH Ma'ruf ini dianggap sebagai nilai plus bagi dewan juri.

- c. Burhanuddin Abdullah dari kategori praktisi. Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, telah aktif mengkampanyekan perbankan syariah melalui berbagai seminar, tidak saja di kalangan perbankan naming juga di kalangan ulama dan masyarakat umum. Dalam kepemimpinannya, juga tetap komitmen dalam pengembangan perbankan syariah dengan meningkatkan status biro perbankan syariah BI menjadi direktorat perbankan syariah BI.
6. Dalam bidang produk-produk perbankan syariah yang inovatif dan kreatif dan strategis.

Strategi pengembangan perbankan syariah secara teknis dalam hal produk-produk inovatif yang dilakukan oleh bank-bank syariah saat ini, berdasarkan hasil penelitian peneliti bertujuan untuk memperluas jaringan perbankan syariah dan memberikan kemudahan dalam hal pelayanan bagi nasabah. Produk-produk tersebut :

- a. Diterbitkannya obligasi sub ordinasi syariah oleh Bank muamalat Indonesia yakni Obligasi Mudharabah Subordinasi sebesar Rp. 200 milyar. Penerbitan obligasi ini berjalan baik dan seluruhnya diserap pasar. Kesuksesan ini sekaligus menunjukkan instrument pasar modal islami telah diterima secara luas oleh komunitas bisnis di Indonesia.
- b. Pembukaan Gerai Muamalat yang bekerjasama dengan PT POS Indonesia. Program ini dirancang untuk menjangkau nasabah potensial yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Saat ini baru beroperasi di 50 lokasi yang tersebar di sembilan provinsi. Pembukaan Gerai Muamalat ini otomatis meningkatkan jumlah outlet Bank Muamalat dari 66 unit pada tahun 2002 menjadi 158 pada tahun 2003.
- c. Kerjasama dalam jaringan penggunaan mesin ATM. Kerjasama yang dilakukan Bank Muamalat dengan ATM BGA dan ATM Bersama dapat memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan tunai pada 4885 ATM di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu pemegang ATM Bank Muamalat juga bisa mengakses 18.000 titik debit BCA.

Bank BNI Syariah juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penarikan tunai. Bekerjasama dengan *Cirrus*, para nasabah dapat melakukan penarikan tunai melalui ATM berlogo *cirrus* di seluruh penjuru dunia dengan mata uang setempat. Untuk di Indonesia bisa mengambil uang melalui lebih dari 2000 ATM bank BNI di seluruh Indonesia.

- d. Bank Muamalat bekerjasama dengan Perum Pegadaian membuka *counter-counter* gadai emas syariah.

Dalam kerjasama ini pihak BMI berfungsi sebagai penyedia dana dan pembimbing aspek bisnis syariah.

Sedangkan pihak Perum pegadaian bertanggung jawab terhadap operasional gadai secara umum.

- e. Penerbitan produk Shar-E. Produk ini tidak saja dimaksudkan untuk meningkatkan penghimpunan dana tetapi juga untuk menjembatani nasabah agar tetap dapat mengakses perbankan syariah, meskipun secara fisik nasabah jauh dari kantor bank syariah. Sebagai mitra jaringan, Bank Muamalat bekerja sama dengan PT. POS Indonesia karena jaringan PT. POS yang telah tersebar di seluruh Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Posisi Bank Syariah Dengan Adanya Fatwa Haram MUI

- a. Posisi lembaga Perbankan Syariah secara yuridis formal dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 menjadi sama atau sederajat dengan bank konvensional. Dengan adanya fatwa MUI bahwa bunga bank haram, hal tersebut secara nasional menyebabkan penambahan dana pada perbankan syariah. Namun untuk Kota Semarang, tidak terjadi penambahan dana yang signifikan. Posisi bank syariah dengan adanya fatwa MUI dalam perbankan nasional tetap sebagai lembaga intermediasi, bank syariah mempunyai peranan pada pembangunan nasional.
- b. Faktor pendukung dalam operasional bank syariah antara lain landasan hukum UU No. 10 Tahun 1998 yang memakai *dual banking system*, keberagaman produk perbankan syariah, potensi pasar yang cukup besar karena mayoritas penduduk Indonesia muslim, masih banyak masyarakat muslim yang menginginkan sistem perbankan berdasar prinsip syariah.
- c. Faktor Penghambat operasional bank syariah antara lain kelengkapan aturan perbankan syariah yang masih sangat minim, kurangnya

pemahaman masyarakat karena sosialisasi yang kurang, SDM yang masih langka, belum konseannya ulama terhadap perbankan syariah, kurang pengembangan/jaringan kantor bank syariah.

2. Perkembangan Hukum perbankan Syariah

- a. Hukum perbankan syariah belum diatur secara terpisah dan masih menginduk dengan Undang-undang Perbankan Konvensional. Perkembangan hukum perbankan syariah dimulai dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 yang dalam penyebutan istilahnya "bank berdasar bagi hasil". Kemudian tahun 1998 diundangkan UU no. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menyebut "bank berdasar prinsip syariah". Selanjutnya karena tuntutan masyarakat tahun 2002 dibuat naskah akademik RUU Perbankan Syariah, yang diharapkan akan terwujud UU Perbankan Syariah.
- b. Prospek pasar bank syariah ke depan sangat bagus karena didukung dengan potensi 80 % penduduk Indonesia adalah muslim serta keberagaman produk yang menarik.
- c. Strategi pengembangan bank syariah terdapat pada Cetak Biru Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yaitu terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, terciptanya system perbankan syariah yang

kompetitif dan efisien, terciptanya stabilitas serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

B. SARAN

Perkembangan bank syariah dipengaruhi oleh fasilitas perundang-undangan sebagai landasan operasionalnya dan juga partisipasi masyarakat. Penulis menyarankan :

1. Pemerintah segera mengusulkan RUU Perbankan Syariah untuk dibahas di DPR dan dijadikan Undang-undang. Karena merupakan landasan operasional bank syariah yang mempunyai karakteristik tersendiri disbanding bank konvensional.
2. Pihak bank seharusnya melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat baik melalui lembaga informal maupun formal. Jalur informal yang digunakan misalnya dengan cara mengadakan kajian-kajian bekerja sama dengan takmir masjid wilayah setempat mengenalkan tentang bank syariah secara terus menerus. Kajian tersebut bisa berbentuk pengajian ataupun khotbah Jumat yang diberikan saat salat Jum'at secara terus-menerus dan berlanjut. Bila dilakukan secara terus menerus, Insya Allah masyarakat akan mempunyai gambaran tentang bank syariah.
3. Pihak bank terus menerus melakukan pendidikan dan latihan kepada sumber daya manusia bank syariah.

4. Pihak akademisi baik negeri maupun swasta untuk mengantisipasi perkembangan bank syariah yang begitu cepat dengan membuka program-program kajian ekonomi Islam dan Perbankan Islam.
5. Disarankan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memanfaatkan jasa-jasa perbankan syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995)
- Agus, Bustanuddin, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Studi Banding Antara Pandangan Ilmiah Dan Ajaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Ahmad, Amrullah dkk, *Penyunting, Islamisasi Ekonomi Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta : PLP2M, 1985)
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, (Jakarta : Pustaka kaustar, 2001)
- Al Jauziyyah, Ionul Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqin'in, juz II*, ttp,tt
- Al Jurjani, Syaikh ali Ahmad, *Hikmah al Tasri' wa Falsafatuhu*, Maktabah Jami'iyah al-Azhar, Cairo, t.t.
- AlMaududi, Abu al-A'la, *ar-Riba, dar al Fikr*, t.t.p, t.t.
- Ali, M Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bisnis dan Perbankan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999)
- _____, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- _____, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta : 1999)
- An-Nawawi, *Majma' Syarh al Muhadzdzab*, jilid IX, (Kairo : Zakariyah Ali Yusuf, tt)
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta : Alvabet, 2000)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Karya, 1998)
- Asikin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)

At-thabary, *Jami'al Bayan*, Jilid 5, Maktab Islam, (Beirut: 1972)

Azhary, HM Taher, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992)

Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989)

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta , BI, 2005)

Bank Indonesia dan Law Offices of REMY & DARUS, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta : BI, 2002)

Black, James A. dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Eresco, 1992)

BPS, *Kota Semarang dalam Angka*, 2003

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian Perbandingan*, Terjemahan F. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)

Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaannya*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2003)

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)

Djazuli A, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996)

El-Diwany, Tarek, *The Problem With Interest Sistem Bunga Dan Permasalahannya*, Terjemahan oleh Amdiar Amir, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2003)

Faisal, Sanapih, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: YA3 Malang, 1990)

- Fahrudin, Fuad Mohd., *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT Al Ma'arif, (Bandung: 1983)
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM Yogya, 1969)
- Haron, Sudin, *Islamic Banking Rules & Regulations*, (Malaysia : Pelanduk, 1997)
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003)
- Hay, Malik Marhainis Abdul, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*, (Jakarta : UPN Veteran, 1983)
- Hefner, Robert W, Geger Tengger: *Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, (Yogyakarta: LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, 1999)
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung, Mandar Maju, 2002)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kj. Veger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1993)
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, (Jakarta : 2002)
- Mannan, Muhamad Abdul, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1993)
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2002)

Mufti, Aries, *Bunga Bank : Masalah Atau Muslihat?*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2004)

Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

_____, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002)

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta :UII Press,2001)

_____, (Editor), *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002)

_____, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000)

_____, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta : PSEI STIS YOGYA, 2003)

Muslehuddin, Muhammad, *Banking and Islamic Law-Sistem Perbankan Dalam Islam*, Penerjemah Aswin Sinamora, (Jakarta : Rineka Cipta , 1994)

Nasution, S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998)

Nawawi, Hadari dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)

Nonet, Philippe, Philip Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, (New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper Colophon Books Harper & Row, Publishers 1978)

Paloma M, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)

Perwataatmaja, Karnaen dan M Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimna Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992)

Qardhawi, Yusuf, *Norma Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1977)

- _____, Yusuf, *Fawaid al Bunuk Hiya ar Riba al Haram (Bunga Bank Haram)*, Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001)
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Rifai, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978)
- Robert W Hefner, *Geger Tengger : Perubahan Sosial Dan Perkelahian Politik*, (Yogyakarta, LKIS bekerjasama dengan The Asia Foundation, 1999)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung : Almaarif, 1997)
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001)
- Santosa, Ruddy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1996)
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000)
- Siddiqi, Nejatullah, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law-Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam Seri Ekonomi Islam No. 5*, Terjemahan oleh Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Sitanggal, Abu Ahmadi Anshori Umar, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip, Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*, (Surabaya, : Bina Ilmu, 1980)
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003)
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2003)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, (Bandung : Erisco, 1991)

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Semarang: Penerbit Agung Press, 1989)
- Sumitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2001)
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung, Mandar maju, 1995)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990)
- Suyuthi, Jalaludin as, *Al-Asybah Nadhair*, (Beirut : Darul Fikri, 1995)
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 1999)
- Taimiyyah, Muhammad , *Al-muntaqo'*, Salafiyah, Beirut, tt.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2001)
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002)
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti, 2003)
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian & Pengamalan Islam (LPPI), 2001)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaifullah Maksum et al, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002)
- Zeithing, Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi*, diterjemahkan oleh Ansori & Juhanda, (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1986)

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 34/36/Kep/Dir Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

MAKALAH

Arifin, Zainul, *Operasional Bank Syariah Di Indonesia*, disampaikan pada Lokakarya Perbankan Syariah Bagi Ulama tanggal 26 April 1999 di gedung BI Jakarta.

Biro Perbankan Syariah, *"Perkembangan dan Arah Kebijakan Perbankan Syariah Nasional"* disampaikan pada Training For Trainers FE-UII, Yogyakarta, 9-10 September 2003

BI Surabaya, *"Tugas BI dalam Pembinaan dan Pengawasan Perbankan"*, disampaikan dalam Pelatihan Khusus Hakim Tingkat Pertama, Malang 2002

Djamil, Fathurrahman, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah Di Indonesia*, disampaikan pada seminar "Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan, diselenggarakan oleh Business Reform and Construction (BRRC), Jurnal Hukum Bisnis, Law Offices of REMY & DARUS bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia di Ruang Gedung Serba Guna Gedung B Lantai 3, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, 18 Juli 2002.

Falah, Syamsul, *Perbankan Syariah Sebuah Alternatif Perbankan Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Nasional, 2000, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Mei, 2000

- Fauzi, Yuslam *"Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah"* disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam se Indonesia (SEMNAS KoKaSEI) 11-13 Mei 2000 di FE UNDIP
- Husein, Ibrahim, *"Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam"*, disampaikan dalam Workshop on Bank and Banking Interest, Safari Garden Hotel, Cisarua, 1990
- Iljas, Achyar, *"Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syariah"*, Seminar Nasional Perbankan Syariah diselenggarakan oleh STAIN Surakarta SEM Institute Yogyakarta, 22 Juli 2000
- Karim, Adiwirnan A, *Realita dan Regulasi dan Perbankan Syariah di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional "Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Perbankan, Asuransi Pasar Modal, PT Asuransi Syariah Mubarakah, 30 Mei 2002
- Pujirahayu, Esmi Warassih, *Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora*, disampaikan dalam Pelatihan Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas hukum UNDIP, Semarang, 14-15 Mei 1999
- Pujiyono, Arif, *"Posisi dan Prospek Bank Syariah dalam Dunia Usaha Perbankan"*, disampaikan pada diskusi Bedah Bisnis Bank Syariah, tanggal 4 Mei 2004 HIMPS Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang).
- Rudjito, *"Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Praktis"*, disampaikan pada Seminar Perbankan Syariah Dalam Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan, diselenggarakan oleh Business Reform & Reconstruction (BRRC), Jurnal Hukum Bisnis, Law Offices Of REMY & DARUS bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia di Ruang Serbaguna Gedung B lantai 3, bank Indonesia, 18 Juli 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat*, disampaikan pada seminar "Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan, diselenggarakan oleh Business Reform and Construction (BRRC), Jurnal Hukum Bisnis, Law Offices of REMY & DARUS bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia di Ruang Gedung Serba Guna Gedung B Lantai 3, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, 18 Juli 2002.

MAJALAH

Mimbar Hukum, No. 15 Thn V 1994

Majalah Masalah-masalah Hukum FH Undip No.5/1995

Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 3-2003/1424 H

Majalah Modal No.16/II-FEBRUARI 2004

Jurnal Hukum Bisnis Volume 20,(Jakarta : Agustus September 2002)

SUMBER LAIN

Hartono, Sri Redjeki, *"Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi"*, Pidato Pengukuhan pada peresmian Jabatan Guru Besar di dalam Hukum dagang, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 18 Desember 1995

Penelitian BI, "Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta", 2000